

**RENCANA STRATEGIS
DINAS KEHATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2021-2026**



DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
Jl. P. Diponegoro Komplek Perkantoran Pemda Bukit Menderang Muara Sabak Barat



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN

Jl. P. Diponegoro Komplek Perkantoran Pemda Bukit Menderang Kel. Rano
Muara Sabak Barat

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 236 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2021 – 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan kabupaten di bidang kesehatan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu disusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. bahwa dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaga Negara Tahun 1999

- Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 Nomor 2);
25. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 12).

MEMUTUSKAN

- PERTAMA : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2021-2026.
- KEDUA : Mengesahkan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan pada dinas kesehatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan sebagai bentuk penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud Diktum kedua digunakan sebagai acuan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam penyelenggaraan program pembangunan kesehatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal Desember 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



PRNAWATI, S.Kep., Ns., M.Kes
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19690617 199502 2 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 236 TAHUN 2021
TANGGAL : 9 NOVEMBER 2021
TENTANG : Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026

**RENCANA STRATEGIS
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2021-2026**

DINAS KESEHATAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja keras sektor kesehatan, tetapi sangat dipengaruhi pula oleh hasil kerja serta kontribusi positif berbagai sektor pembangunan lainnya. Untuk optimalisasi, hasil kerja serta kontribusi positif tersebut, “ Wawasan Kesehatan ” perlu dijadikan sebagai asas pokok program pembangunan nasional, dalam pelaksanaannya seluruh unsur atau subsistem dari Sistem Kesehatan Nasional (SKN) berperan sebagai penggerak utama pembangunan nasional berwawasan kesehatan yang dijabarkan dalam bentuk program-program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Dan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai salah satu pelaku pembangunan kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Tahun 2021-2026.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk kurun waktu tahun 2021-2026.

Dengan kondisi yang diharapkan yaitu kondisi pembangunan kesehatan telah mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia seperti meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, tumbuh kembang optimal, serta menurunnya kesenjangan antar individu, antar kelompok masyarakat dan antar desa.

Pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika yang berkembang serta globalisasi dan demokratisasi dengan

semangat kemitraan, kerjasama lintas sektor dan mendorong peran serta aktif masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Dengan segala kerendahan hati, kami mohon masukan dan saran untuk terus dapat meningkatkan kualitas dan arah serta tujuan pembangunan kesehatan yang lebih baik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, atas segala dukungan dan partisipasinya dalam menyusun dan menyempurnakan dokumen ini.

Akhir kata semoga RENSTRA Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021–2026 ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas pada umumnya dan untuk lebih meningkatkan kualitas serta kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada khususnya, sehingga pembangunan kesehatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilaksanakan secara optimal dan terpadu dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Muara Sabak, Desember 2021
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

ERNAWATI, S.Kep., Ns., M.Kes
NIP. 19690619199503 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GRAFIK.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Landasan Hukum	3
I.3 Maksud dan Tujuan... ..	7
I.4 Hubungan Rencana Strategis Dinkes Kab dengan Dokumen Perencanaan lainnya	9
I.5 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	12
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	12
2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan.....	23
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten.....	24
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.....	38
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	40
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	40
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	47
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.....	50
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	55
3.5 Isu Strategis.....	58
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN.....	60
4.1 Tujuan Perangkat Daerah.....	60
4.2 Sasaran Perangkat Daerah.....	62

BAB V.	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	65
BAB VI.	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	70
BAB VII.	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	78
BAB VIII.	PENUTUP.....	83
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Distribusi Tenaga Kesehatan Berdasarkan Jenis Pendidikan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2016-2020..... 23
Tabel 2.2	Jumlah Sarana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2020..... 24
Tabel 2.3	Perkembangan Indikator Derajat Kesehatan..... 25
Tabel 2.4	Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan..... 25
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021-2026..... 34
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur..... 36
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur..... 64
Tabel 5.1	Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026..... 68
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mengacu pada Tahun 2021-2026..... 79
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026..... 80

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 2.1 Jumlah Kasus Demam Berdarah yang Datang Kepelayanan Kesehatan se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2020.....	30
Grafik 2.2 Prevalensi Penderita Kusta Per 10.000 Penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2020.....	31

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Hubungan antara RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis dan Rencana Anggaran.....	9
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif baik secara sosial maupun ekonomi. Untuk itu seluruh komponen bangsa harus mempunyai tanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan, baik itu anggota masyarakat, peran swasta, organisasi kemasyarakatan maupun organisasi profesi yang dikoordinasikan oleh pemerintah.

Pembangunan kesehatan diarahkan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan melalui promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Selain itu pembangunan kesehatan juga diarahkan untuk meningkatkan dan memelihara mutu fasilitas kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana kesehatan, termasuk didalamnya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan.

Paradigma perencanaan pembangunan yang lebih harmonis dan selaras, baik antara pusat dengan daerah, daerah dengan daerah, dan juga antar instansi dan fungsi pemerintahan, merupakan landasan utama dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), sebagai acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.

Salah satu konsekuensi dari ditetapkannya undang-undang tersebut adalah diwajibkannya bagi setiap perangkat kerja daerah untuk menyusun rencana kerja

sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Terkait dengan kewajiban perangkat daerah dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan, UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 272 Ayat 1 mengamanatkan bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman kepada RPJMD”. Sedangkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7 ditetapkan ketentuan umum mengenai “Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”.

Mengacu kepada hal tersebut di atas maka Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2021-2026. Rencana Strategis Dinas Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang didasarkan pada penjabaran dari Visi dan Misi Bupati terpilih tahun 2021-2026 dan mengadopsi pokok-pokok perencanaan RENSTRA Kementerian Kesehatan Tahun 2020–2024, serta memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan dengan mendorong peran aktif masyarakat untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Renstra tersebut digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Usaha mewujudkan visi dan misi kepala daerah tertuang dalam dokumen renstra didukung dengan strategi dan arah kebijakan, yang kemudian diterjemahkan ke dalam program-program kemudian diuraikan kedalam kegiatan-kegiatan yang mendukung masing-masing program tersebut.

Selain itu urgensi penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini adalah :

1. Menjadi acuan penyusunan RENJA,
2. Dasar penilaian kinerja Kepala SKPD,
3. Menjadi acuan penyusunan LAKIP.

Renstra OPD dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, khususnya di bidang kesehatan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

- 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan

dan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 I-7 Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

31. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 5);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 Nomor 3).
35. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 12).
36. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis Dinas Kesehatan kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 – 2026 disusun dengan maksud dan tujuan untuk :

1. Penjabaran visi dan misi serta kebijakan lainnya dengan merumuskan program kegiatan dan pembangunan sebagai langkah dan strategi untuk mencapai visi, misi serta tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Kesehatan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3. Menyediakan bahan pedoman untuk Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kurun waktu tahun 2021 - 2026.
4. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
5. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan di bidang kesehatan dalam jangka waktu lima tahun dari tahun 2021 sampai dengan 2026 yang akan menjadi pedoman pembangunan kesehatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Tersusunnya tujuan dan sasaran pembangunan di bidang kesehatan.
7. Tersusunnya berbagai Kebijakan di Bidang Kesehatan yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan rencana pembangunan di bidang kesehatan dalam kurun waktu satu tahun sampai lima tahun.
8. Memberikan arah terhadap kebijakan keuangan Dinas Kesehatan, strategi pembangunan kesehatan dan program-program pembangunan kesehatan, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka yang bersifat indikatif selama 5 (lima) tahun ke depan.
9. Sebagai bahan pedoman untuk Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kurun waktu tahun 2021 - 2026.
10. Penyusunan Rencana Strategis ini juga dimaksudkan untuk pedoman dalam pengukuran keberhasilan atau kegagalan yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan kabupaten Tanjung Jabung Timur.

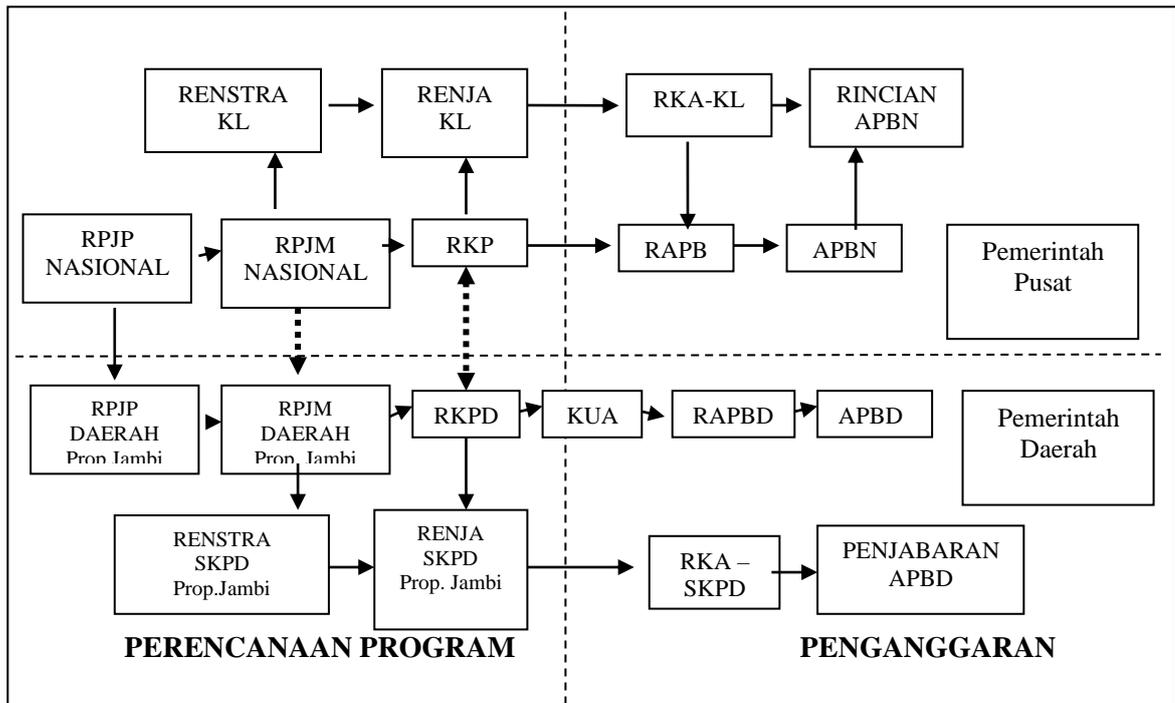
1.4 HUBUNGAN RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2021 - 2026 DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021 - 2026 menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Dinas

Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan digunakan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Hubungan antara Dokumen-dokumen perencanaan dan Dokumen Penganggaran dapat diketahui dari gambar dibawah ini ;

Gambar 1.1
Hubungan antara RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis dan Rencana Anggaran



Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa :

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan telah disusun berdasarkan Perencanaan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan memperhatikan Rencana Pembangunan Menengah (RPJM) Nasional.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN.

Penyajian dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 mengacu pada sistematika penulisan sesuai ketentuan

sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dengan susunan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada latar belakang memuat secara ringkas pengertian rencana strategis dinas kesehatan, fungsi dari rencana strategis dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan rencana strategis, keterkaitan rencana strategis dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi serta dengan Rencana Kerja Dinas Kesehatan. Selain itu memuat juga landasan hukum, maksud dan tujuan dari penyusunan rencana startegis serta sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang tugas, fungsi dan susunan organisasi dinas kesehatan dalam penyelenggaraan urusan kesehatan, mengulas secara ringkas sumber daya dinas kesehatan, capaian kinerja dinas kesehatan periode sebelumnya serta tantangan dan peluang yang dihadapi dan diatasi melalui rencana strategis.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan dinas kesehatan, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan rencana strategis kementerian kesehatan dan rencana strategis dinas kesehatan provinsi, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Memuat telaah visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang kemudian diuraikan ke dalam tujuan dan sasaran, disertai target kinerja yang akan dicapai dinas kesehatan selama periode tahun 2021-2026.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. Selain itu

diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

- Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
Pada bagian ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerja, sasaran dan pendanaan indikatif. Penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.
- Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Memuat indikator kinerja dinas kesehatan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja yang dimaksud adalah indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci dinas kesehatan.
- Bab VIII Penutup Memuat kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi rencana strategis dinas

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada saat ini adalah melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta disamping diberi tugas pokok dan fungsi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Tugas Pokok Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu : “Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten”.

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2.1.1 Tugas Dan Fungsi Dinas Kesehatan

Dinas kesehatan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan di bidang kesehatan, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
2. Penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat;
3. Penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit;
4. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
5. Penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia kesehatan;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan;
7. Pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan; dan

8. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang kesehatan yang diberikan oleh Bupati

2.1.2 Bidang Tugas dan Unsur-Unsur Dinas Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. Pengelolaan urusan kepegawaian;
- c. Pengelolaan urusan keuangan;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- f. Pengelolaan urusan umum.

Sekretariat membawahi 2 sub bagian yaitu :

1) Sub bagian umum dan kepegawaian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha serta pengelolaan urusan umum dan kepegawaian yang meliputi:

- a. penyiapan bahan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, serta penyusunan laporan kegiatan kepegawaian di lingkungan dinas;
- b. penyiapan bahan penetapan mutasi dan administrasi jabatan fungsional di lingkungan dinas;
- c. penyiapan bahan penetapan pemberhentian dan pensiun pegawai di lingkungan dinas;

- d. penyiapan bahan urusan surat menyurat, pengagendaaan dan pengiriman;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan sistem informasi;
- f. penyiapan bahan pengelolaan arsip dan dokumentasi;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan protokol;
- h. penyiapan bahan pengelolaan urusan perlengkapan;
- i. penyiapan bahan pengelolaan urusan rumah tangga dan pengamanan;
- j. penyiapan bahan pelaksanaan urusan kendaraan dan perjalanan dinas; dan
- k. penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat.

2) Sub bagian perencanaan dan keuangan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan serta pengelolaan urusan keuangan yang meliputi:

- a. penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta perpustakaan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan
- d. penyiapan bahan pelaksanaan anggaran, pembuatan daftar gaji, dan pembayaran gaji pegawai;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan tata usahan keuangan, dan
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan pembukuan, perhitungan, dan penyusunan laporan keuangan.

3. Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat.

Bidang Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeliharaan kesehatan keluarga;
- b. Pelaksanaan pembinaan gizi masyarakat;
- c. Pelaksanaan promosi kesehatan dan informasi program kesehatan;
- d. Pelaksanaan pemberdayaan kesehatan masyarakat; dan
- e. Pelaksanaan upaya penyehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga

Bidang kesehatan masyarakat membawahi 3 seksi yaitu :

1) Seksi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemeliharaan kesehatan keluarga dan pembinaan gizi masyarakat yang meliputi :

- a. penyiapan bahan pemeliharaan kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana serta lanjut usia;
- b. penyiapan bahan surveilans pangan dan pemetaan gizi masyarakat serta pengembangannya;
- c. penyiapan bahan penyusunan pedoman pencegahan dan pengendalian gizi makro dan mikro;
- d. penyiapan bahan intervensi, rekomendasi serta kerjasama lintas sektoral dan program masalah gizi; dan
- e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi kabupaten

2) Seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan promosi kesehatan dan informasi program kesehatan serta pemberdayaan kesehatan masyarakat yang meliputi:

- a. penyiapan bahan pemberian informasi dan penyuluhan kesehatan;
 - b. penyiapan bahan pengembangan media, teknologi KIE, dan sarana promosi kesehatan dengan lintas program dan lintas sektor;
 - c. penyiapan bahan surveilens pangan dan pemetaan gizi masyarakat serta pengembangannya;
 - d. penyiapan bahan penyusunan pedoman pencegahan dan pengendalian gizi makro dan mikro;
 - e. penyiapan bahan intervensi, rekomendasi serta Kerjasama lintas sectoral dan program masalah gizi;
 - f. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi kabupaten;
 - g. penyiapan bahan pemberdayaan dan pengorganisasian masyarakat seperti KAT, Posyanddu, Desa Siaga, UKS dan UKBM dan lain-lain.
- 3) Seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga
Mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan upaya penyehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga yang meliputi:
- a. penyiapan bahan pelaksanaan upaya penyehatan lingkungan melalui penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, penyehatan udara, tanah dan kawasan serta pengamanan limbah dan radiasi;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan upaya penyehatan lingkungan kerja dan olahraga; dan
 - c. penyiapan bahan pemantauan, pengukuran kualitas lingkungan serta

4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit.

Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan surveilence epidemiologi dan imunisasi;

- b. Pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular;
- c. Pelaksanaan pengendalian (respon) terhadap kejadian luar biasa (KLB);
- d. Pelaksanaan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAFZA; dan
- e. Pelaksanaan pengembangan SIK

Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit membawahi 3 seksi yaitu :

1) Seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan surveilence dan imunisasi yang meliputi:

- a. penyiapan bahan program pengamatan dengan sistem surveilence penyakit menular dan penyakit tidak menular (PTM);
- b. penyiapan bahan pemberian imunisasi terhadap bayi, balita, anak sekolah, dan wanita usia subur (WUS) untuk memberikan perlindungan terhadap penularan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I);
- c. penyiapan bahan kecukupan persediaan vaksin dan bahan bundling untuk puskesmas dan unit pelayanan kesehatan swasta yang melakukan imunisasi; dan
- d. penyiapan bahan koordinasi pemeriksaan kesehatan dan imunisasi terhadap calon jamaah haji serta pengamatan terhadap jamaah haji sepulang dari tanah suci.

2) Seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa

mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan kesehatan jiwa yang meliputi:

- a. penyiapan bahan bimbingan dan pembinaan tentang penyakit tidak menular;
- b. penyiapan bahan penanggulangan kejadian luar biasa atau wabah penyakit tidak menular; dan
- c. penyiapan bahan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA.

3) Seksi surveilence dan imunisasi

mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular yang meliputi:

- a. penyiapan bahan bimbingan dan pembinaan tentang penyakit menular;
- b. penyiapan bahan pemberantasan penyakit menular langsung dan penyakit bersumber binatang; dan
- c. penanggulangan kejadian luar biasa atau wabah penyakit menular.

5. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta pengelolaan sumber daya manusia kesehatan.

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional;
- b. Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi perizinan di bidang kesehatan;
- c. Pelaksanaan pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; dan
- d. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia kesehatan

Bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan membawahi 3 seksi yaitu :

1) Seksi pelayanan kesehatan

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan kesehatan serta fasilitasi pemberian rekomendasi perizinan di bidang kesehatan yang meliputi:

- a. penyiapan bahan penerbitan izin dan klasifikasi rumah sakit kelas C dan D dalam Kabupaten;
 - b. penyiapan bahan penerbitan izin pelayanan kesehatan swasta serta izin operasional laboratorium swasta; dan
 - c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja rumah sakit serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
- 2) Seksi kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga
Mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang meliputi:
- a. penyiapan bahan pengelolaan gudang farmasi Kabupaten;
 - b. penyiapan bahan kecukupan persediaan farmasi, alat kesehatan dan PKRT untuk UPTD;
 - c. penyiapan bahan pengawasan kualitas dan keamanan sediaan farmasi;
 - d. penyiapan bahan pemantauan dalam rangka penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal;
 - e. penyiapan bahan pemantauan dalam rangka penerbitan izin industri kecil obat tradisional (IKOT);
 - f. penyiapan bahan pemantauan dalam rangka sertifikasi produk alat kesehatan kelas 1 tertentu dan PKRT kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga;
 - g. penyiapan bahan pemantauan dalam rangka sertifikasi produk makanan dan minuman pada industri rumah tangga; dan
 - h. penyiapan bahan pemantauan dalam rangka sertifikat laik sehat terhadap pangan siap saji, uji sampel dan izin iklan.
- 3) Seksi sumber daya manusia kesehatan
Mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia kesehatan yang meliputi :
- a. penyiapan bahan penerbitan izin praktek tenaga kesehatan;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan registrasi, fasilitasi akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan.

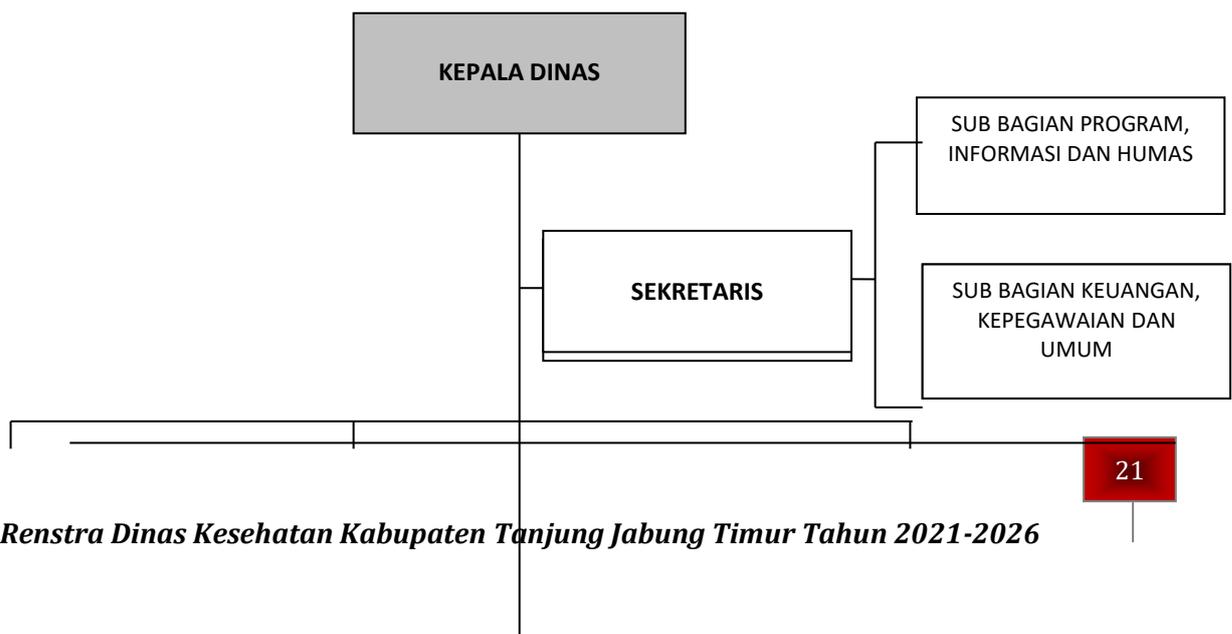
2.1.3 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan

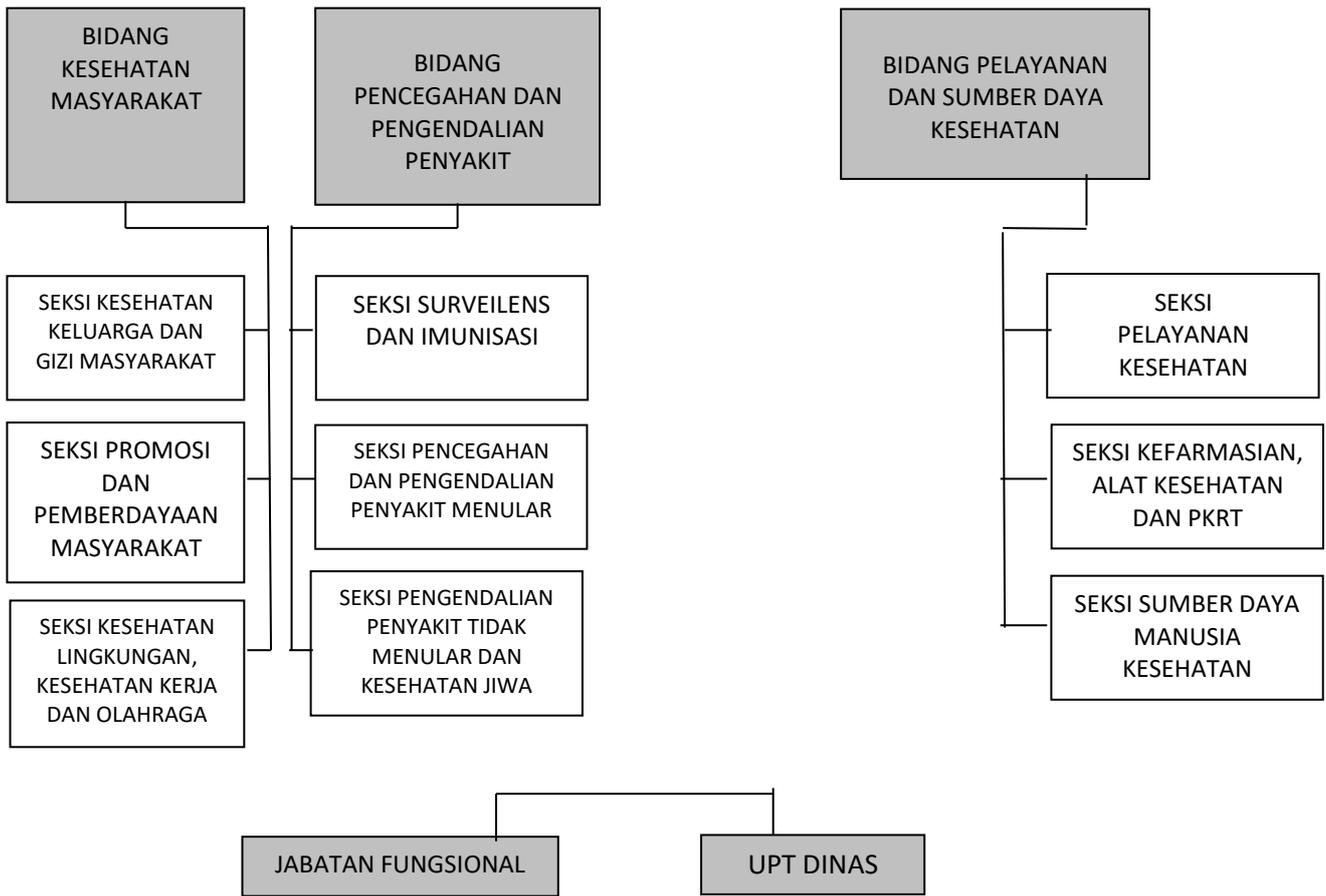
Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengacu kepada Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub bagian umum dan kepegawaian
 - b. Sub bagian perencanaan dan keuangan
- 3) Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Seksi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat
 - b. Seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat
 - c. Seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga
- 4) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari :
 - a. Seksi surveilance dan imunisasi
 - b. Seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular
 - c. Seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa
- 5) Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari
 - a. Seksi pelayanan kesehatan
 - b. Seksi kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga
 - c. Seksi sumber daya manusia kesehatan

Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada gambar 1.1 di bawah ini.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur





2.2 SUMBER DAYA DINAS KESEHATAN

2.2.1 Sumber Daya Kesehatan

Tenaga Kesehatan merupakan pendukung utama dalam pembangunan kesehatan. Jumlah dan kualitas tenaga kesehatan seharusnya sesuai dengan kebutuhan. Jumlah pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2020 sebanyak 1.059 orang. Adapun rincian sebagai berikut :

- a. Pejabat Struktural : 52 orang
- b. Staf Pelaksana : 57 orang
- c. Tenaga teknis lainnya : 950 orang

Perkembangan jumlah tenaga Dinas Kesehatan Kabupaten dari Tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Distribusi Tenaga Kesehatan berdasarkan Jenis Pendidikan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2016 – 2020

No	Jenis Tenaga	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	S2 Kesehatan + Non Kesehatan	2	2	2	3	3
2	Dokter Spesialis	0	0	0	0	0
3	Dokter Umum	22	21	26	29	28
4	Dokter gigi	7	4	10	8	9
5	Apoteker	3	8	8	7	12
6	Sarjana Kesmas	42	61	76	76	91
7	Sarjana Keperawatan	17	18	14	28	33
8	Bidan	257	369	353	403	416
9	Perawat	204	191	213	204	214
10	Sanitarian	26	21	24	24	34
11	Nutrisi	11	12	19	23	31
12	Tenaga Farmasi	19	16	25	18	22
13	Tenaga Teknisi Medis	0	0	0	0	0
14	Tenaga lainnya	116	137	80	129	166

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana penunjang program dan kegiatan yang dimiliki Dinas Kesehatan Kabupaten adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Sarana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2020

No	Jenis Tenaga	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Puskesmas Perawatan	8	8	8	8	8
2	Puskesmas	17	17	17	17	17
3	Puskesmas Pembantu	59	59	59	58	58
4	Poskesdes	24	24	24	23	23
5	Polindes	28	28	28	31	31
6	Ambulance+pusling	20	20	20	15	18
7	Kendaraan Roda Dua	251	251	251	244	267
8	Klinik (swasta)	1	1	1	1	1

Dari tabel 2.2 diatas dapat dilihat bahwa ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dari tahun ketahun ada yang mengalami penambahan dan ada yang mengalami penurunan, ini dikarenakan beberapa sarana ada dalam kondisi rusak berat sehingga tidak dapat digunakan. Dengan demikian ketersediaan sarana yang ada belum mencukupi dari yang diharapkan dalam peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan dasar masyarakat terutama keluarga miskin dan rentan.

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pembangunan kesehatan antara lain diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan merupakan suatu investasi jangka panjang dalam kaitannya untuk mendukung kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi yang kompetitif, serta peningkatan kesejahteraan sosial yang pada akhirnya merupakan salah satu upaya dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

Untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan Dinas Kesehatan dalam melaksanakan visi dan misi kepala daerah tahun sebelumnya dapat diukur melalui capaian kinerja. Tingkat capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2017-2020 dapat dilihat dari berbagai indikator sasaran, salah satunya adalah indikator derajat kesehatan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3
Perkembangan Indikator Derajat Kesehatan

No	Indikator Kesehatan	Capaian tahun 2017	Capaian tahun 2018	Capaian tahun 2019	Capaian tahun 2020
1	Umur harapan hidup	65,4 th	65,9 th	66,08 th	66,23 th
2	Angka kematian bayi	20,24 per 1000 kelahiran hidup	21,92 per 1000 kelahiran hidup	22,17 per 1000 kelahiran hidup	23,89 per 1000 kelahiran hidup
3	Angka kematian ibu	6 (angka absolut)	4 (angka absolut)	2 (angka absolut)	6 (angka absolut)
4	Status gizi				
	• Gizi balita kurang	1,37 % 0,03 %	0,69 % 0,02 %	0,92 % 0,04 %	4,85 % 0,07%
	• Gizi balita buruk				

Selain indikator derajat kesehatan, kondisi capaian indikator kinerja pembangunan kesehatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditunjukkan dengan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan pada tahun 2018, 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian Tahun 2018	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai standar	91,01%	92,01%	89,45%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian Tahun 2018	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan persalinan di fasilitas kesehatan sesuai standar	45,96%	54,06%	64,74%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	98,30%	95,32%	96,16%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	90,51%	108,55%	82,68%
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia sekolah dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	97,17%	32,61%	76,98%
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Persentase WNI usia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	12,17%	40,54%	22,78%
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Persentase WNI usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	9,42%	15,71%	87,93%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	49,90%	25,95%	13,31%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	20,60%	106,01%	96,24%
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa	Persentase ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	98,00%	89,65%	97,49%
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	Persentase penderita TB mendapat pelayanan TB sesuai standar	100%	59,01%	30,10%
12	Pelayanan Kesehatan Oang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan pemeriksaan HIV sesuai standar	65,5%	71,52%	31,52%

Sumber : Kesehatan Tanjung Jabung Timur Dalam Angka

Pada tabel-tabel di atas dapat dilihat gambaran kinerja pelayanan kesehatan sampai tahun 2020 sebagai berikut :

1. Umur Harapan Hidup

Meningkatnya umur harapan hidup secara tidak langsung memberikan gambaran adanya peningkatan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat. Rata-rata umur harapan hidup penduduk Kab. Tanjung Jabung Timur tahun 2020 adalah 66,23 tahun (BPS Kab. Tanjab Timur 2020). Apabila dilihat data 4 tahun terakhir, dari tahun 2017-2020 ternyata angka harapan hidup mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun bila dibandingkan dengan target nasional, angka ini masih dibawah target.

2. Angka Kematian (Mortalitas)

Untuk Angka kematian belum bisa digunakan secara pasti, namun berdasarkan laporan dan pendataan berdasarkan puskesmas serta dengan menggunakan Bencmarking (Patok duga) indikator tingkat propinsi dan kabupaten yang kondisi sosial ekonomi dan masalah kesehatannya hampir bersamaan dapatlah di estimasi sebagai berikut ;

a. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator yang sangat penting untuk mengetahui gambaran tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi, air bersih, dan infeksi penyakit di masyarakat

Angka kematian bayi (AKB) Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun yaitu 20,24 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2017 (9 kasus kematian bayi) menjadi 23,98 per 1000 kelahiran hidup tahun 2020 (20 kasus kematian), dengan rata-rata penyebab kematian adalah BBLR, Asfiksia, Diare, dan penyebab lainnya. Angka kematian bayi yang terus meningkatkan tentunya harus menjadi perhatian seluruh lini dalam upaya menekan AKB tersebut.

b. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka kematian Ibu berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu ibu melahirkan dan masa nifas.

Untuk mengantisipasi masalah kesehatan ini maka diperlukan terobosan-terobosan dengan mengurangi peran dukun dan meningkatkan peran Bidan dengan jalan melakukan kemitraan bidan dan dukun. Dengan harapan bidan didesa benar-benar sebagai ujung tombak dalam upaya penurunan AKI dan AKB.

Masalah lain yang perlu dicermati adalah belum mampunya masyarakat membayar bidan dan masyarakat lebih senang melahirkan di rumah daripada di sarana kesehatan yang tersedia.

Angka kematian ibu maternal (AKI) diperoleh melalui berbagai survey yang dilakukan secara khusus seperti survey di Rumah sakit dan beberapa survey di masyarakat dengan cakupan wilayah yang terbatas. Sedangkan di kabupaten Tanjung Jabung Timur hanya bisa memberikan Jumlah kematian. Jumlah kematian Ibu kabupaten dapat dilihat pada tabel dibawah ini, penyebab kematian dikarenakan pendarahan, eklampsi, infeksi, dan yang berkaitan dengan terlambat ketiga yakni terlambat mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan.

Dari fakta yang ada di lapangan, faktor penyebab langsung kematian ibu masih didominasi oleh eklampsia dan penyebab lain-lain. Sedangkan faktor tidak langsung penyebab kematian ibu adalah faktor 3 (tiga) Terlambat yaitu terlambat mencapai fasilitas pelayanan, terlambat mendapatkan pertolongan yang cepat dan tepat di fasilitas pelayanan dan terlambat dalam mengenali tanda bahaya kehamilan dan persalinan, dan 4 (empat) Terlalu yaitu terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering dan terlalu banyak. Keduanya saling berkaitan dengan faktor akses, sosial budaya, pendidikan dan ekonomi.

Potensi dan tantangan dalam penurunan kematian ibu dan anak adalah jumlah tenaga kesehatan yang menangani kesehatan ibu khususnya bidan yang masih perlu ditingkatkan kompetensinya. Demikian juga keberadaan Puskesmas PONEK dan RS PONEK harus diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan. Peningkatan kesehatan ibu sebelum hamil terutama pada masa remaja juga menjadi faktor penting dalam penurunan AKI dan AKB. Meningkatnya peserta KB juga

merupakan potensi dalam menurunkan kematian ibu, namun harus terus digalakkan penggunaan kontrasepsi jangka panjang. Keanekaragaman makanan juga menjadi potensi dalam program peningkatan gizi ibu hamil, sehingga kedepan akan terus dikembangkan paket pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil yang tinggi kalori, protein dan mikronutrien. Dalam upaya akselerasi penurunan AKI dan AKB di Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah diadakan beberapa kegiatan yang diharapkan dapat memberikan daya ungkit terhadap percepatan penurunan AKI dan AKB antara lain peningkatan cakupan dan kualitas pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, kegiatan P4K (Pemantapan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi), pertemuan AMP (Audit Maternal Perinatal) sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun guna membahas faktor penyebab kematian bayi dan ibu serta upaya penanganannya, pelacakan kasus Bumil Resti, pertemuan evaluasi dan tindak lanjut PWS-KIA.

Jumlah kematian ibu pada tahun 2020 meningkat dibandingkan pada tahun 2019, pada tahun 2019 sebesar 2 kasus kematian ibu, namun pada tahun 2020 meningkatkan cukup signifikan yaitu sebesar 6 kasus kematian ibu. Meningkatnya angka ini tentunya harus menjadi perhatian khusus dalam upaya mencari akar penyebab dan melakukan intervensi yang tepat guna menurunkan AKI tersebut.

3. Angka Kesakitan (Morbiditas)

a. Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)

Upaya pemberantasan penyakit DBD dititik beratkan pada penggerakan potensi masyarakat untuk dapat berperan serta dalam pemberantasan sarang nyamuk (PSN) yaitu gerakan 3 M, juru pemantau jentik (Jumantik) untuk memantau angka bebas jentik (ABJ) serta penyuluhan pengenalan gejala DBD dan penanganannya di rumah tangga. Adapun rekapitulasi kasus penyakit DBD dari tahun 2016-2020 sebagaimana pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

Grafik 2.1
Jumlah Kasus Demam Berdarah yang Datang Kelayakan Kesehatan
se- Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016-2020



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kasus DBD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berfluktuasi, sehingga perlu dilakukan antisipasi agar tidak terjadi peningkatan kasus atau KLB.

d. Penyakit Tuberkulosis Paru

Situasi penyakit TB paru di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari tahun 2020 terhadap penemuan penderita baru sebesar 176 kasus, angka ini lebih rendah dibandingkan pada tahun 2019 yang mencapai 222 kasus. Dan angka kesembuhan sebesar 42,61%, angka ini belum mencapai target nasional yaitu 85%.

e. Penyakit Kusta

Situasi penyakit kusta, kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan kabupaten endemis penyakit kusta di provinsi Jambi. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan untuk mencegah penularan penyakit tersebut dengan memberikan penyuluhan di desa endemis. Pada tahun 2020 ditemukan sebanyak 30 penderita baru, dengan prevalensi 1,3 per 10.000 penduduk dan masih diatas target nasional < 1/10.000 penduduk. Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun 2019 yaitu sebanyak 36 penderita baru dengan prevalensi 1,63 per 10.000 penduduk. Berbagai upaya dilakukan oleh Kabupaten Tanjung Jabung

Timur dalam rangka menekan kasus kusta, dengan harapan tahun 2025 Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat menuju eliminasi kusta.

Grafik 2.2
Prevalensi Penderita Kusta Per 10.000 Penduduk di Kabupaten
Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2020



Sumber : Kesehatan Tanjung Jabung Timur Dalam Angka 2020

4. Perbaikan Gizi Keluarga

a. Pemantauan Pertumbuhan Balita

Upaya pemantauan terhadap pertumbuhan Balita dilakukan melalui kegiatan penimbangan di Posyandu secara rutin setiap bulan. Menurut hasil pengumpulan data dari 17 puskesmas, pada tahun 2020 jumlah balita yang ditimbang sebanyak 15.469 jiwa. Hasil penimbangan menunjukkan bahwa 751 balita (4,85%) merupakan gizi kurang dan 11 balita (0,07%) dengan gizi buruk.

b. Cakupan Pemberian Asi Eksklusif

Cakupan pemberian ASI eksklusif pada tahun 2020 hanya sebesar 62,77%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2019 sebesar yaitu hanya sebesar 55,55%.

5. Pelayanan Kesehatan Dasar.

a. Pelayanan Antenatal (K1 dan K4)

Cakupan K1 selama 4 tahun terakhir berfluktuasi. Pada tahun 2017 sebesar 99,11%, tahun 2018 menurun menjadi 98,01%, pada tahun 2019 meningkat menjadi 100,91% dan pada tahun 2020 menurun kembali menjadi 95,58%. Bila dibandingkan dengan target kabupaten

tahun 2020 yaitu > 95%, cakupan tersebut telah mencapai target sasaran.

Cakupan K4 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2020 mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2019 sebesar 92,01%, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 89,45%.

b. *Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan*

Komplikasi dan kematian ibu maternal dan bayi baru lahir sebagian besar terjadi pada masa di sekitar persalinan, hal ini antara lain disebabkan karena pertolongan persalinan tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan (profesional). Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2017 sebesar 94,25% dan 2020 turun menjadi 92,15%.

c. *Kunjungan Neonatus (Bayi kurang dari 1 bulan)*

Cakupan kunjungan neonatus tahun 2020 meningkatkan dibandingkan pada tahun 2020. Pada tahun 2019 sebesar 96,9%, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 98,3%. Bila dibandingkan dengan angka nasional sudah memenuhi target.

d. *Pelayanan Imunisasi*

Pencapaian Universal Child Immunization (UCI) pada dasarnya merupakan proksi terhadap cakupan sasaran bayi yang telah mendapatkan imunisasi secara lengkap. Bila cakupan UCI dikaitkan dengan batasan suatu wilayah tertentu, berarti dalam wilayah tersebut juga menggambarkan besarnya tingkat kekebalan masyarakat (herd immunity) terhadap penularan PD3I.

Pada tahun 2020, jumlah desa UCI sebanyak 86 desa (92,5%), dibandingkan tahun 2019 ternyata terjadi penurunan desa UCI, dimana tahun 2019 berjumlah 87 desa (93,5%).

Dari uraian diatas dan hasil dari capaian kinerja berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) masih terdapat beberapa indikator belum mencapai target, hal ini dipengaruhi oleh :

- Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM kesehatan.
- Masih banyaknya wilayah-wilayah terpencil yang sulit dijangkau oleh pelayanan kesehatan
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan
- Perilaku masyarakat dan kesadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) khususnya pada masyarakat di pedesaan dan masyarakat dengan status sosial ekonomi menengah ke bawah masih rendah. Capaian kinerja berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dapat dilihat pada tabel di bawah ini .

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun Anggaran 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Pelayanan Kesehatan Dasar																		
	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	100 %			93,5	94	95	96	97	95,5	90,90	91,01	92,01	89,45	100	96,7	95,8	95,8	92,2
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan persalinan di fasilitas kesehatan sesuai standar	100%	70 %		50	55	65	70	75	30	37,16	45,96	54,06	64,74	60	67,6	70,7	77,2	86,3
	Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100%	70 %		98,5	98,6	98,7	98,8	99	98,6	100,07	98,30	95,32	96,16	100	100	99,7	96,5	97,13
	Persentase anak usia 0-59 bln yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			87	89	90	92	94	75	78	90,51	108,55	82,68	86,2	87,6	100	100	87,9
	Persentase anak usia sekolah dasar yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar	100%			95	95,5	96	96,50	97	95	95,37	97,17	32,61	76,98	100	99,9	101,2	33,8	79,4
	Persentase WNI usia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	100%	70 %		40	55	60	65	70	8,2	8,40	12,17	40,54	22,78	20,5	15,3	20,3	62,4	32,5
	Persentase WNI usia 60 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	100%	85 %		84	85	86	88	89	25	26,03	9,42	15,71	87,93	29,76	30,6	10,9	19,6	98,8
	Persentase penderita hipeertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			50	55	60	65	70	51	51,40	49,90	25,95	13,31	100	93,4	83,2	39,9	19,01
	Persentase penyandang DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			50	55	60	65	70	25	25,90	20,60	106,01	96,24	50	47,1	34,3	100	100
No					Target Renstra OPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				

(1)	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya															
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)										
	Persentase ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan	100%			50	55	60	65	70	84	84,90	98	89,65	97,49	100	100	100	100	100
	Persentase penderita TB mendapat pelayanan TB sesuai standar	100%			60	65	70	75	80	100	100	100	59,01	30,10	100	100	100	78,68	37,6
	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan pemeriksaan HIV sesuai standar	100 %			20	25	30	35	40	45	50	65,5	71,52	31,52	100	100	100	100	78,8
	Cakupan kunjungan neonatal (KN1)				96	96,5	97	97,2	97,5	99,33	100,64	100	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan peserta KB aktif				80	82	84	86	88	78,46	106,82	92,13	103,2	99,7	98,07	100	100	100	100
	Persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi				96,8	97	97,5	97,7	98	100,8	108,2	95,4	99,2	93,8	100	100	97,85	100	95,7
	Persentase gizi balita buruk yang mendapat perawatan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase ASI Eksklusif				63	65	68	70	72	58	50,62	31,98	55,55	62,77	92,06	77,88	47,03	79,36	87,18
	Cakupan penemuan dan penanganan penyakit DBD				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Angka kesembuhan TB Paru BTA+				93	94	95	96	97	97,96	91	91,5	97,60	35,44	100	96,8	96,3	100	36,54
2	Derajat Kesehatan Masyarakat																		
	Mortalitas																		
	1. Angka Kematian Bayi				22	21,5	21	20,5	20	21,29	20,24	21,99	22,17	23,89	100	100	95,5	92,69	83,7
	2. Angka Kematian ibu melahirkan				5	5	5	4	4	8	6	4	2	6	62,5	83,3	100	100	66,7
	3. Umur harapan Hidup				65,45	65,5	65,55	65,6	65,6	65,43	65,4	65,69	66,08	66,23	99,97	100	100	100	100

Tabel 2.6
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan
 Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke (Ribuan)				
		(Ribuan)					(Ribuan)									
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Belanja Tidak Langsung	22.953.124	21.961.000	29.145.083	40.039.208	41.604.765	22.123.010	22.855.773	28.872.551	38.349.837	39.150.740	96,4	104	99,06	95,78	94,10
2	Belanja Langsung	48.125.957	40.610.312	41.866.412	49.425.406	59.989.441	42.911.191	33.804.228	34.724.215	42.803.061	52.001.361	89,2	83,2	82,94	86,60	86,68
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.145.409	1.690.275	2.054.033	2.594.913	2.559.509	1.982.392	1.558.895	1.982.538	2.543.158	2.466.062	92,4	92,2	96,52	98,01	96,35
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	31.300	30.200	37.800	-	-	25.230	26.380	37.500	-	-	80,6	87,4	99,21	0,00	0,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.400.102	1.332.661	418.600	384.410	66.492	3.894.144	1.206.874	352.392	350.092	64.783	88,5	90,6	84,18	91,07	97,43
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	352.664	322.950	208.204	169.746	34.360	326.216	266.122	205.577	155.770	33.298	92,5	82,4	98,74	91,77	96,91
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	20.000	-	7.386	8.350	183.119	20.000	-	7.386	8.350	179.898	100,0	0,0	100,00	100,00	98,24
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	2.643.212	2.484.237	2.520.158	2.488.966	1.293.648	2.276.716	2.424.010	2.449.511	2.479.443	1.292.552	86,1	97,6	97,20	99,62	99,92
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	5.994.642	7.852.736	8.659.436	8.137.976	29.080.350	5.327.672	7.215.748	7.492.981	4.946.499	26.863.319	88,9	91,9	86,53	60,78	92,38
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	183.726	351.898	206.158	155.959	339.602	180.195	349.118	184.420	152.541	333.533	98,1	99,2	89,46	97,81	98,21
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	203.696	281.194	88.495	563.315	818.109	193.595	264.287	84.740	509.272	701.543	95,0	94,0	95,76	90,41	85,75
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	151.836	343.882	288.515	336.185	250.749	147.076	314.935	257.114	319.918	248.254	96,9	91,6	89,12	95,16	99,00
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	794.760	442.877	554.157	545.087	5.552.608	756.850	395.829	500.301	527.431	2.900.949	95,2	89,4	90,28	96,76	52,24
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	217.700	229.900	152.060	187.560	-	210.200	205.360	152.060	187.500	-	96,6	89,3	100,00	99,97	0,00

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke (Ribuan)				
		(Ribuan)					(Ribuan)									
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	18.257.450	6.972.525	5.345.755	8.255.993	15.652.305	17.320.928	6.722.664	2.963.451	7.997.471	14.111.271	94,9	96,4	55,44	96,87	90,15
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	-	17.253	-	-	-	-	17.253	-	-	-	0,0	100,0	0,00	0,00	0,00
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia dan Balita	49.800	16.990	-	14.119	-	42.025	16.990	-	13.719	-	84,4	100,0	0,00	97,17	0,00
	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan	69.618	96.862	13.800	18.980	6.200	68.828	96.752	13.300	18.880	6.200	98,9	99,9	96,38	99,47	100,00
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	214.527	280.453	165.421	240.410	64.440	213.847	230.342	156.451	224.125	37.170	99,7	82,1	94,58	93,23	57,68
	Program Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan	811.724	557.105	799.856	446.016	-	798.901	497.325	785.897	423.880	-	98,4	89,3	98,25	95,04	0,00
	Program Pengembangan Kesehatan	407.217	1.067.578	554.277	1.215.990	2.073.619	386.927	817.245	531.108	1.119.995	1.602.278	95,0	76,6	95,82	92,11	77,27
	Program Perizinan Praktek Kesehatan	12.050	-	-	-	-	11.700	-	-	-	-	97,1	0,0	0,00	0,00	0,00
	Program Jaminan Kesehatan Nasional	6.475.011	6.167.662	6.060.688	7.837.421	-	4.877.964	4.764.573	5.262.917	6.471.306	-	75,3	77,3	86,84	82,57	0,00
	Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	4.097.000	8.060.686	11.051.781	14.151.000	-	3.847.769	6.008.239	10.503.879	13.465.760	-	93,9	74,5	95,04	95,16	0,00
	Program Jaminan Persalinan	592.510	1.803.839	2.425.340	1.443.000	1.443.654	-	204.490	560.374	665.458	624.582	0,0	11,3	23,10	46,12	43,26
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	-	206.555	254.488	230.009	568.657	-	198.780	238.300	220.474	535.663	0,0	96,2	93,64	95,85	94,20

Dari tabel anggaran di atas dapat dilihat bahwa rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 berfluktuasi, pada tahun 2016 sebesar 91,50%, tahun 2017 turun menjadi 90,55%, tahun 2018 sebesar 89,56% dan naik Kembali pada tahun 2019 sebesar 90,71% dan turun Kembali pada tahun 89,72%. Besarnya reallisasi anggaran pada tahun 2020 dianggap baik, namun masih ada beberapa kegiatan yang realisasinya tidak mencapai 60%, sehingga mempengaruhi capaian kegiatan lainnya. Kegiatan ini tidak terlaksana karena adanya pembatasan sosial akibat Covid-19 sehingga kegiatan program tidak bisa langsung ke masyarakat.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Dari analisis capai sasaran, maka diperoleh beberapa tantangan yang perlu diantisipasi antara lain :

- a. Kemampuan ekonomi masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih rendah, hal ini mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan/mengakses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, sehingga masyarakat cenderung mencari pelayanan pengobatan alternatif yang lebih murah dan tidak dibawah pengawasan tenaga kesehatan.
- b. Perilaku masyarakat dan kesadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) khususnya pada masyarakat di pedesaan dan masyarakat dengan status sosial ekonomi menengah ke bawah masih rendah.
- c. Kondisi geografis beberapa wilayah tertentu menghambat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
- d. Kesadaran masyarakat terhadap asuransi kesehatan belum tumbuh dengan baik, terlihat dari masih rendahnya kemandirian masyarakat untuk membiayai jaminan pemeliharaan kesehatannya.
- e. Jejaring penanganan masalah kesehatan belum melibatkan sektor terkait dan belum optimal.
- f. Ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat publik dan perbekalan kesehatan yang bermutu di unit pelayanan obat dan perbekalan kesehatan pemerintah maupun swasta, belum sesuai dan sistem yang ada belum tertata secara optimal.

- g. Ketersediaan jumlah, jenis, distribusi dan kualitas tenaga kesehatan yang belum mampu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, khususnya di puskesmas. Bila melihat kondisi saat ini, terdapat beberapa puskesmas yang belum memenuhi ketersediaan 9 jenis tenaga kesehatan yang wajib ada di puskesmas. Untuk itu perlu koordinasi dan pengambilan kebijakan dalam upaya penyediaan dan pemerataan tenaga kesehatan dengan pihak Pembina dan pengelola kepegawaian daerah.

Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan antara lain :

- a. Terdapat peraturan perundangan yang terkait dengan pelayanan kesehatan diantaranya : (1) Undang-Undang Dasar 1945 pasal. 34 ayat 1, 2 dan 3, (2) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (4) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan dan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Dukungan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terpilih terhadap urusan kesehatan sangat besar dan menjadi salah satu prioritas sektor pembangunan yang teruang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- c. Kemajuan yang pesat ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan.
- d. Terdapat organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat.
- e. Adanya dukungan anggaran kesehatan melalui dana alokasi khusus (DAK) fisik maupun non fisik

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan kondisi dinamika perubahan lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap program dan kegiatan, ditambah ketersediaan sumber daya kesehatan dan hasil evaluasi kinerja pelayanan kesehatan, maka identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut :

1. Kejadian kematian ibu, bayi dan balita

Setiap tahun masih ditemukan kasus kematian ibu maternal, bayi dan balita. Akar masalah dari kematian ibu maternal ini terjadi karena : 1) risiko tinggi kehamilan dan melahirkan akibat kondisi ibu hamil yang tidak sehat menyebabkan komplikasi kebidanan; 2) masih ditemukan kasus anemi pada ibu hamil dan wanita usia subur serta beberapa diantaranya kekurangan energi kalori; 3) keterlambatan atau ketidakmampuan dalam mengakses pemanfaatan pelayanan prenatal dan obstetri; 4) belum semua ibu hamil memeriksakan kehamilan secara lengkap dan mendapat pelayanan antenatal sesuai standar; 5) masih ada ibu bersalin yang melakukan persalinan tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau dengan tenaga kesehatan yang kompeten; 6) belum semua ibu nifas mendapat pelayanan kesehatan pasca persalinan sesuai standar. Akar masalah dari kematian bayi dan balita adalah : 1) masih ditemukannya kasus komplikasi neonatal dan bayi resiko tinggi dengan berat badan lahir rendah; 2) belum semua bayi baru lahir mendapat pelayanan neonatal sesuai standar; 3) masih ada bayi yang belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap; 4) masih banyak anak baduta yang belum mendapatkan imunisasi lanjutan; 5) rendahnya kesadaran orang tua memeriksakan tumbuh kembang balita di posyandu minimal 8 kali/tahun.

2. Kejadian Masalah Gizi Balita

Kabupaten Tanjung Jabung Timur sejak tahun 2018 merupakan kabupaten tertinggi kedua di Provinsi Jambi dengan kasus stunting, sehingga mulai tahun 2019 Kabupaten Tanjung Jabung Timur di jadikan lokus stunting. Selain ditemukan kasus stunting pada balita, juga terdapatnya gizi kurang dan gizi buruk. Penyebab adanya ditemukan stunting, gizi kurang dan buruk di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena : 1) rendahnya asupan balita terhadap makanan bergizi, vitamin dan mineral, serta buruknya keragaman pangan dan sumber protein hewani; 2) kurang baiknya pola asuh bayi dan balita; 3) akses sanitasi dan air bersih keluarga yang rendah; 4) beberapa temuan kasus balita gizi buruk disertai dengan penyakit infeksi kronis.

3. Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan masih rendah

Perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat merupakan salah satu faktor penting untuk peningkatan status kesehatan penduduk. Dari data Profil Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan bahwa PHBS tatanan rumah tangga baru mencapai 45,43% tahun 2019 dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 49,4%.

Persentase bayi usia 4-6 bulan yang memperoleh ASI eksklusif pada tahun 2019 sebanyak 55,55% dan pada tahun 2020 sebesar 62,77%, namun masih jauh dari target nasional pada tahun 2020 sebesar 80%. Hal ini menunjukkan perilaku yang memprihatinkan untuk perkembangan bayi. Sedangkan partisipasi masyarakat melalui berbagai kegiatan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat) dengan adanya posyandu purnama dan mandiri baru sebesar 50,3% pada tahun 2020. Ini menunjukkan partisipasi dari masyarakat dalam upaya pemberdayaan kesehatan berbasis masyarakat belum optimal.

4. Kondisi kesehatan lingkungan dan permukiman masih rendah

Salah satu faktor penting lainnya yang berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat adalah kondisi lingkungan yang tercermin antara lain dari indikator kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar. Kondisi kesehatan lingkungan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih belum

menggembirakan yang ditunjukkan dari indikator desa STBM pada tahun 2020 sebanyak 73 desa, desa stop BABS sebanyak 16 desa dan belum ada desa yang STBM. Akses penduduk/keluarga terhadap jamban sehat sebesar 75,03%, tempat tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan sebesar 39,3%. Selain indikator tersebut, hygiene sanitasi tempat-tempat umum dan tempat pengelolaan makanan juga mempengaruhi kondisi kesehatan lingkungan, pada tahun 2013, dari rumah/bangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diambil sampelnya menunjukkan tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2020 hanya sebesar 15,9%.

5. Kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan belum berjalan optimal

Pada tahun 2020 jumlah puskesmas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebanyak 17, Puskesmas Pembantu sebanyak 58 dan Poskesdes sebanyak 24. Rasio puskesmas terhadap penduduk adalah 1 : 13.000 dan masih jauh dari konsep pembangunan puskesmas yaitu 1 puskesmas untuk 10.000 penduduk. Sarana kesehatan lainnya adalah 1 buah Rumah Sakit Umum Daerah (RSU Nurdin Hamzah) dan 1 buah Rumah Bersalin. Tentunya ini berdampak terhadap tinggi rendahnya kinerja pelayanan kesehatan, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator kesehatan ibu dan bayi, pelayanan kesehatan anak pra sekolah dan usia sekolah, pelayanan imunisasi dan proporsi penemuan kasus (SDR) tuberculosis paru. Pada tahun 2019, persalinan yang ditolong tenaga kesehatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur baru mencapai 54,04% dan meningkat menjadi 64,74% pada tahun 2020, angka ini masih jauh dari target (100%).

Faktor utama penyebab tingginya angka kematian bayi sebenarnya dapat dicegah dengan intervensi yang dapat terjangkau dan sederhana. Oleh karena itu kinerja pelayanan kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan penduduk.

6. Status Kesehatan Masyarakat Masih Rendah.

Angka kematian bayi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2020 adalah 23,89 per 1.000 kelahiran hidup. Penyakit infeksi yang menjadi penyebab utama kematian pada bayi dan balita seperti ISPA, diare, tetanus

neonatorum dan penyulit kelahiran mempunyai faktor resiko lebih tinggi pada masyarakat miskin. Penyakit lain yang sering diderita penduduk miskin adalah tubercolusis paru dan demam berdarah. Rendahnya status kesehatan masyarakat, terutama penduduk miskin pada umumnya disebabkan terbatasnya akses terhadap pelayanan kesehatan dan kendala biaya. Rendahnya status kesehatan masyarakat juga disebabkan oleh beberapa sebab yaitu rendahnya Indeks keluarga sehat skala Kabupaten Tanjung Jabung Timur dikarenakan : 1) keterbatasan tenaga kesehatan yang melakukan pendataan sasaran keluarga sehat; 2) kebiasaan merokok di rumah menjadi masalah tertinggi penyebab keluarga kategori tidak sehat; 3) belum membudayanya perilaku hidup bersih dan sehat dalam keluarga; 4) kegiatan penyuluhan PHBS dan keluarga sehat belum lakukan secara optimal; 5) masih banyak masyarakat miskin tidak memiliki kemampuan untuk membangun jamban; 6) di beberapa tempat kebiasaan masyarakat buang air besar sembarangan masih kuat.

Kondisi masih adanya kasus penyakit menular diantaranya : 1) masih ditemukannya kasus TB baru dan kasus TB MDR (Multi Drug Resistance) akibat tidak tuntas atau tidak teratur dalam meminum obat TB; 2) kasus ISPA dan Diare masih menjadi penyakit terbanyak yang terjadi pada anak balita; 3) kasus kusta baru masih saja ditemukan setiap tahunnya; 4) upaya penemuan dan pengobatan HIV/ AIDS belum optimal; 5) kasus DBD masih ditemukan setiap tahun karena kegiatan PSN belum optimal.

Semakin meningkatnya kasus penyakit tidak menular, ditandai dengan : 1) masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini terhadap faktor risiko hipertensi, diabetes melitus, kanker dan kesehatan jiwa; 2) masyarakat usia produktif dan lansia masih enggan melakukan pemeriksaan kesehatan berkala di fasilitas pelayanan kesehatan maupun di posbindu dan posyandu lansia.

Masih ada masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan, ditandai dengan : 1) belum update-nya data masyarakat miskin yang belum mendapat jaminan kesehatan nasional; 2) belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas data kemiskinan dan data penerima jaminan kesehatan lintas

sektor; 3) masih rendahnya kesadaran masyarakat berpenghasilan menengah keatas dan pekerja sektor informal untuk mengikuti program jaminan kesehatan secara mandiri.

7. Terbatasnya tenaga kesehatan tertentu dan distribusi tidak merata

Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami kekurangan pada hampir semua jenis tenaga kesehatan yang diperlukan. Keterbatasan ini diperburuk oleh distribusi tenaga kesehatan yang belum merata. Misalnya, belum ada dokter spesialis di Puskesmas karena seluruh dokter spesialis berada di Rumah Sakit. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM Kesehatan dan pemerataan tenaga kesehatan strategis dapat ditandai dengan : 1) belum terpenuhi 9 jenis tenaga kesehatan di beberapa puskesmas; 2) masih kurangnya pembinaan terhadap mutu/kualitas tenaga kesehatan; 3) pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan strategis masih kurang; 4) peran organisasi profesi dalam sertifikasi tenaga kesehatan belum optimal.

8. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan

Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan disebabkan oleh pelayanan publik di Dinas Kesehatan belum berjalan optimal, ini ditandai dengan : 1) pelayanan publik satu pintu perlu ditingkatkan pada ketersediaan fasilitas, kenyamanan dan keramahan; 2) belum terbukanya informasi publik sesuai ketentuan peraturan yang berlaku; 3) inovasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat belum sesuai harapan. Selain itu tata kelola pemerintahan di Dinas Kesehatan belum akuntabel, ditandai dengan : 1) belum efektif dan efisiennya perencanaan dan penganggaran sebab hasil evaluasi kinerja belum menjadi bahan perencanaan tahun berikutnya; 2) sistem informasi manajemen pembangunan daerah belum mampu menjawab tantangan akuntabilitas kinerja; 3) proses monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja belum berjalan dengan baik; 4) kualitas penatausahaan aset daerah yang sesuai perlu ditingkatkan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang diperkirakan akan dihadapi 5 (lima) tahun ke depan, dilakukan analisis lingkungan strategis yang meliputi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan Ancaman (*threats*). Adapun uraiannya sebagai berikut :

- A. Identifikasi dan Analisis Kekuatan
1. Terdapat berbagai sumber alokasi anggaran dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan baik dari Pemerintah Kabupaten (APBD), Pemerintah Provinsi, Pemerintah pusat (DAK) maupun anggaran hibah.
 2. Keberadaan UPT Dinas Kesehatan memberi kontribusi dalam pelayanan kepada masyarakat.
 3. Tersedianya sistem upaya kesehatan sampai ke tingkat desa.
 4. Tersedianya sumber daya manusia kesehatan sampai ke tingkat desa.
- B. Identifikasi dan Analisis Kelemahan
1. Kemampuan sumber daya kesehatan dalam melaksanakan pembinaan teknis bidang kesehatan kurang sehingga banyak yang tidak menindaklanjuti hasil pembinaan misalnya dengan memberikan umpan balik dan solusi pemecahan masalah.
 2. Penempatan tenaga belum sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan.
 3. Penyelenggaraan manajemen kesehatan di berbagai tingkat administrasi, belum terpadu dan berkesinambungan, dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta belum semua pelayanan umum bidang kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
 4. Sistem Informasi kesehatan untuk mendukung manajemen kesehatan masih belum optimal.
- C. Identifikasi dan Analisis Peluang
1. Terdapat peraturan perundangan yang terkait dengan pelayanan kesehatan diantaranya : (1) Undang-Undang Dasar 1945 pasal. 34 ayat 1, 2 dan 3, (2) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (4) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (6) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan dan (7) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2. Kemajuan yang pesat ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan.
3. Terdapat organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat.

D. Identifikasi dan Analisis Ancaman

1. Mobilitas penduduk yang tinggi antar wilayah di Kabupaten dan perbatasan Provinsi mempercepat sebaran penyakit menular. Hal ini mengakibatkan angka kesakitan dan kematian karena penyakit menular meningkat misalnya HIV/AIDS dan DBD.
2. Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mulai ditemui pola makan dan gaya hidup yang tidak sehat misalnya merokok, mengkonsumsi junk food dan mengkonsumsi narkoba, hal ini berdampak buruk terhadap kesehatan khususnya pada penyakit degeneratif/penyakit tidak menular misalnya Diabetes Miletus (DM), Kardiovaskuler dan kanker (keganasan).
3. Kemampuan ekonomi masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih rendah, hal ini mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan/mengakses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, sehingga masyarakat cenderung mencari pelayanan pengobatan alternatif yang lebih murah dan tidak dibawah pengawasan tenaga kesehatan.
4. Perilaku masyarakat dan kesadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) khususnya pada masyarakat di pedesaan dan masyarakat dengan status sosial ekonomi menengah ke bawah masih rendah.
5. Kondisi geografis beberapa wilayah tertentu menghambat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
6. Pengetahuan masyarakat terhadap asuransi kesehatan belum tumbuh dengan baik, terlihat dari masih rendahnya kemandirian masyarakat untuk membiayai jaminan pemeliharaan kesehatannya.
7. Penyelenggaraan upaya kesehatan dan hubungan antara pelayanan pemerintah sektor kesehatan dan sektor lain, swasta dan dunia usaha belum jelas.

3.2 TELAHAAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah terpilih yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021-2026.

Berdasarkan RPJMD tersebut, visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode tahun 2021-2026 adalah:

1. Visi

Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang di akhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. Visi Kabupaten Tanjung Jabung Timur :

MERAKYAT

“Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Timur”

Adapun deskripsi dari visi tersebut adalah

“MERAKYAT” mencerminkan kepribadian seorang pemimpin yang dekat dengan rakyatnya, tidak eksklusif, peduli dengan permasalahan rakyat, sehingga dapat mengetahui dan memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat yang harus dilayanani, karena hakekatnya pemimpin itu adalah pelayan masyarakat. “EKONOMI MERAKYAT” mengartikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai harus berpihak kepada rakyat. Capaian pertumbuhan ekonomi harus dapat memperluas lapangan kerja bagi rakyat dan menurunkan angka kemiskinan.

Terhadap Visi Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut di atas, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesehatan.

2. Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Visi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mewujudkan selama 5 (lima) tahun kedepan melalui empat misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Bertumpu Pada Sektor Pertanian dan Perikanan.
2. Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing.
3. Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari
4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Meningkatkan Pelayanan Publik dalam Tatanan Kehidupan yang Nyaman dan Harmonis.

Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tujuan yang ingin dicapai melalui 4 (empat) misi di atas, maka perlu ditetapkan kebijakan pembangunan yang akan menjadi agenda prioritas, dengan lima pilar yaitu :

1. Tanjung Jabung Timur Terkoneksi

Infrastruktur yang layak untuk menunjang sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, fasilitas sekolah, fasilitas kesehatan, industry, pasar, destinasi agrowisata dan wisata bahari serta media informasi;

2. Tanjung Jabung Timur Sejahtera

Penguatan ketahanan ekonomi ditopang sector Peranian dan Perikanan;

3. Tanjung Jabung Timur Berdaya Saing

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pada sector pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, pengendalian penduduk serta ketenagakerjaan;

4. Tanjung Jabung Timur Ekonomi Maju

Peningkatan investasi daerah sektor industri dan penguatan simpul ekonomi daerah;

5. Tanjung Jabung Timur Aman, Nyaman dan Harmonis

Mewujudkan tata kelola pemerintahan dengan penguatan kapasitas birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dari keempat Misi tersebut di atas, maka misi ke 2 (dua), yang harus diemban Dinas Kesehatan. Sebagai salah satu Perangkat Daerah yang ikut mengemban misi ke 2 (dua) bersama Perangkat Daerah yang lain, mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesehatan.

Faktor-faktor penghambat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dapat mempengaruhi visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih sebagai berikut :

1. Perilaku masyarakat dan kesadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) khususnya pada masyarakat di pedesaan dan masyarakat dengan status sosial ekonomi menengah ke bawah masih rendah.
2. Kondisi geografis beberapa wilayah tertentu menghambat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
3. Kesadaran sektor lain bahwa kesehatan merupakan tanggung jawab bersama masih rendah, hal ini mengakibatkan kurangnya dukungan sektor lain terhadap pembangunan kesehatan.
4. Pengetahuan masyarakat terhadap asuransi kesehatan belum tumbuh dengan baik, terlihat dari masih rendahnya kemandirian masyarakat untuk membiayai jaminan pemeliharaan kesehatannya.
5. Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM bidang kesehatan

Faktor-faktor yang mendorong pencapaian visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih adalah :

1. Tersedianya sarana dan prasarana yang telah ada, penempatan bidan desa dan tenaga kesehatan lainnya di desa-desa yang dapat didayagunakan secara optimal dalam melaksanakan pelayanan kesehatan.
2. Tersedianya dana APBD yang dapat digunakan secara optimal.
3. Adanya UPT Dinas Kesehatan yang dapat mendukung kinerja pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

3.3 TELAAHAN RESNTRA KEMENTERIAN KESEHATAN DAN RENSTRA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAMBI

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020- 2024 telah menetapkan Visi Presiden 2020-2024 :

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan yaitu menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. Untuk diketahui bahwa, pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Selain itu pembangunan kesehatan mempunyai peran sentral sebagai pondasi dalam peningkatan kualitas SDM, khususnya terkait aspek pembangunan sumber daya manusia sebagai modal manusia (human capital).

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yakni: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;

9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing (khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan), Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi
2. Angka kematian ibu (maternal mortality rate) dan angka kematian bayi (infant mortality rate) merupakan indikator sensitif untuk mengukur keberhasilan pencapaian pembangunan kesehatan, dan juga sekaligus mengukur pencapaian indeks modal manusia. Pemerintah telah menetapkan penurunan angka kematian ibu sebagai major project, yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien.
3. Menurunkan angka stunting pada balita
Proporsi balita stunting sangat penting sebagai parameter pembangunan modal manusia. Seperti halnya penurunan angka kematian ibu, pemerintah juga telah menetapkan percepatan penurunan stunting sebagai major project yang harus digarap dengan langkahlangkah strategis, efektif dan efisien.
4. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional
Sebagaimana diketahui bersama, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mampu memperbaiki akses pelayanan kesehatan baik ke FKTP maupun FKRTL dan juga telah memperbaiki keadilan (ekualitas) pelayanan kesehatan antar kelompok masyarakat. Namun demikian, pembiayaan JKN selama lima tahun terakhir telah mengalami ketidakseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi JKN, Kementerian Kesehatan memiliki peran sentral dalam kendali mutu dan kendali biaya (cost containment).
5. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.
Sesuai dengan peta jalan kemandirian farmasi dan alat kesehatan, pemerintah telah bertekad untuk meningkatkan industri bahan baku obat dan juga peningkatan produksi alat kesehatan dalam negeri. Agar produksi

dalam negeri ini dapat diserap oleh pasar, pemerintah harus melakukan langkah-langkah strategis untuk mendorong penggunaan obat dan alat kesehatan produksi dalam negeri.

Untuk mewujudkan Misi Presiden dalam Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024, Kementerian Kesehatan menetapkan 5 (lima) Tujuan Strategis, yakni:

- 1) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup;
- 2) Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
- 3) Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat;
- 4) Peningkatan sumber daya Kesehatan.
- 5) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif

Dalam rangka mencapai Tujuan Strategis tersebut, maka ditetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan, sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat;
- 2) Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan
- 3) Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat;
- 4) Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat Kesehatan;
- 5) Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar;
- 6) Terjaminnya pembiayaan Kesehatan;
- 7) Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
- 8) Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan.

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 ini merupakan tahapan keempat dari RPJPD Provinsi Jambi. Dengan mengacu pada RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2005 – 2025 dan RPJMN Tahun 2020-2024 serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang

telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2021 – 2026, yaitu:

“Terwujudnya Jambi Maju. Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional di Bawah Ridho Allah SWT ”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 3 (tiga) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2022 - 2026, sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas.
2. Memulihkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender

Berdasarkan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, maka perangkat daerah Dinas Kesehatan Provinsi Jambi masuk dalam misi ke-3 yaitu Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender dengan sasaran pembangunannya adalah Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat yang diukur dengan meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH) menjadi 71,76 Tahun pada Tahun 2026.

Guna mendukung misi ke-3 tersebut, maka strategi pembangunan daerah di bidang kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Pemantapan kelembagaan Satgas Penanggulangan Covid19
2. Mendorong optimalisasi peran institusi Kesehatan
3. Pembangunan Rumah Sakit Khusus Wabah Penyakit Menular
4. Membangun fasilitas/ sarana prasarana penunjang kesehatan termasuk sarana prasarana transfusi darah
5. Subsidi BPJS bagi keluarga miskin
6. Dukungan kegiatan posyandu
7. Pengembangan RSUD Rd. Mattaher dan Rumah Sakit Jiwa (RSJ)
8. Peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan SDM pelayanan serta optimalisasi promosi Kesehatan
9. Peningkatan cakupan penerima jaminan kesehatan menuju cakupan 100%

Dari gambaran strategi pembangunan kesehatan Provinsi Jambi, maka strategi Dinas Kesehatan Provinsi Jambi tahun 2022-2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kesehatan ibu dan anak serta gizi masyarakat melalui penekanan pendekatan promotif dan preventif dengan optimalisasi dukungan posyandu.
2. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit serta kedaruratan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan
3. Peningkatan dan penguatan fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
4. Optimalisasi promosi kesehatan dan pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
5. Pemenuhan SDM kesehatan dan peningkatan kompetensi sesuai standar
6. Peningkatan mutu pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan serta ketersediaan obat sesuai standar
7. Pemenuhan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu dalam upaya pencapaian Universal Health Coverage (UHC)
8. Penguatan tata Kelola manajemen kesehatan daerah yang didukung oleh system informasi kesehatan.

Adapun Arah kebijakan daerah dalam pembangunan kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Penanggulangan dampak kesehatan akibat Covid-19
2. Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi
3. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi berkelanjutan
4. Fasilitasi distribusi fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang menjangkau seluruh penduduk Provinsi Jambi.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Pada bagian ini dikemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS. Berdasarkan muatan yang ada dalam dokumen RTRW sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2011 – 2031 dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007, Pusat kegiatan perkotaan terdiri atas:

1. PKL (Pusat Kegiatan Lokal) berupa Perkotaan meliputi;
 - a. Perkotaan Nipah Panjang di Kecamatan Nipah Panjang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, perdagangan dan jasa sub regional, sentra pertanian, pusat kesehatan, pusat rekreasi, olahraga dan wisata, pusat pendidikan, dan simpul transportasi;
 - b. Perkotaan Mendahara Ilir di Kecamatan Mendahara berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, perdagangan dan jasa sub regional, perkebunan, pusat kesehatan, pusat rekreasi, olahraga dan wisata, pusat pendidikan, pusat peribadatan, dan simpul transportasi; dan
 - c. Perkotaan Pandan Jaya di Kecamatan Geragai berfungsi sebagai pusat sumber daya energi, industri pertanian, simpul transportasi, pusat industri pengolahan, dan pariwisata.
 - d. Perkotaan Muara Sabak Timur di Kecamatan Muara Sabak Timur berfungsi sebagai pusat industri perikanan, sentra pengolahan hasil pertanian, perdagangan, pusat pendidikan dan olahraga, wisata, perhubungan laut, sentra perikanan, minapolitan, dan simpul transportasi.
2. PKLP (Pusat Kegiatan Lokal Promosi) meliputi:

Perkotaan Bandar Jaya di Kecamatan Rantau Rasau berfungsi sebagai industri pertanian, simpul transportasi, pusat pendidikan dan olahraga, dan pusat industri pengolahan.

3. PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) meliputi:
- a. Perkotaan Pematang Rahim di Kecamatan Mendahara Ulu berfungsi sebagai industri pertanian, simpul transportasi, dan pusat industri pengolahan;
 - b. Perkotaan Kampung Laut di Kecamatan Kuala Jambi berfungsi sebagai industri pertanian, perikanan, rekreasi dan wisata, simpul transportasi, dan pusat industri pengolahan;
 - c. Perkotaan Rantau Indah di Kecamatan Dendang berfungsi sebagai industri pertanian, simpul transportasi, dan pariwisata skala lokal;
 - d. Perkotaan Sungai Lokan di Kecamatan Sadu berfungsi sebagai industri perikanan, perhubungan laut, sentra pertanian, pusat rekreasi dan wisata, dan sentra perikanan (minapolitan);
 - e. Perkotaan Simpang Desa, Kecamatan Berbak berfungsi sebagai industri pertanian, simpul transportasi, budidaya perikanan, pariwisata skala lokal dan regional; dan f. Perkotaan Lambur Luar di Kecamatan Muara Sabak Timur sebagai pusat pertanian dan sentra perikanan (minapolitan).
4. PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan) meliputi :
- Perkotaan Kotabaru KTM Geragai berfungsi sebagai simpul transportasi, sentra pengolahan hasil pertanian, perdagangan dan jasa.

Sedangkan pusat kegiatan perdesaan meliputi seluruh kecamatan di kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kawasan lindung terdiri atas : kawasan hutan lindung, kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, dan kawasan lindung geologi. Kawasan budidaya terdiri atas: kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan peruntukan lainnya.

Penetapan Kawasan Strategis pada RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri atas Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan Strategis Kabupaten. Kawasan

strategis provinsi terdiri atas kawasan Pantai Timur Provinsi Jambi - Kawasan Tungkal Ulu dan sekitarnya meliputi:

- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Muara Sabak Barat;
- b. pengembangan perkantoran skala kabupaten;
- c. pembangunan pusat perdagangan skala sub regional;
- d. pembangunan pusat jasa skala sub regional;
- e. pengembangan pusat kesehatan skala kabupaten;
- f. pengembangan pusat rekreasi, olahraga dan wisata;
- g. pengembangan pusat Pendidikan skala kabupaten
- h. pembangunan masjid;
- i. pengembangan dan pembangunan pelayanan transportasi, berupa pengembangan terminal tipe B;
- j. pembangunan pabrik pengolahan pertanian; dan
- k. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

Perwujudan kawasan strategis kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana meliputi:

- a. kawasan Perkotaan Muara Sabak Barat dan Muara Sabak Timur;
- b. Kawasan Pelabuhan Muara Sabak Barat;
- c. Kawasan Perindustrian Muara Sabak Barat;
- d. Kawasan Rantau Rasau dan sekitarnya;
- e. Kawasan Minapolitan Nipah Panjang dan sekitarnya;
- f. Kawasan ekonomi di Kecamatan Sadu;
- g. Kawasan industri pertambangan Geragai.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program KLHS memuat kajian antara lain;

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;

3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah.

Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:

- a. Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
- b. Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

Dalam KLHS Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 Program prioritas yang memiliki keterkaitan dengan daftar pendek isu-isu pembangunan berkelanjutan dan berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai berikut : Misi 2 : Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing.

3.5 ISU STRATEGIS

Isu strategis yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah :

- A. Menurunkan angka kematian ibu, bayi dan balita
- B. Angka kesakitan dan kematian penyakit masih tinggi.
- C. Kualitas lingkungan masih rendah.
- D. Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh baik gizi kurang maupun gizi lebih.

- E. Optimalisasi capaian dan kualitas promosi kesehatan pada kelompok rentan.
- F. Pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu belum optimal.
- G. Peningkatan kualitas SDM Kesehatan dan pemerataan penyebaran tenaga kesehatan.
- H. Mendorong penerapan pengelolaan keuangan BLUD puskesmas.
- I. Implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
- J. Optimalisasi penanggulangan KLB, Bencana dan Krisis Kesehatan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN PERANGKAT DAERAH

Dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur harus dengan seksama memperhatikan dasar-dasar pembangunan kesehatan sebagaimana tercantum dalam arah dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2020-2024 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025, yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia yang ditandai dengan penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatkannya derajat kesehatan masyarakat oleh meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi, menurunnya angka kematian ibu dan menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita.

Memperhatikan visi Bupati Tanjung Jabung Timur dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur tahun 2021-2026 yaitu:

“Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (MERAHYAT)”

Untuk melaksanakan visi tersebut, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjabarkan visi kepala daerah di bidang kesehatan yaitu menciptakan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri dan sejahtera. Melalui bidang kesehatan, masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur diharapkan memiliki kondisi lingkungan dan perilaku hidup yang sehat, memiliki kemandirian dalam pelayanan kesehatan sehingga menjadi manusia yang produktif dan sejahtera.

Dalam rangka pencapaian Visi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021-2026, ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021-2026, yaitu :

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Bertumpu Pada Sektor Pertanian dan Perikanan;
2. Membangun Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing;
3. Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari;
4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Meningkatkan Pelayanan Publik dalam Tatanan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis;

Memperhatikan prioritas pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut diatas terlihat bahwa pembangunan dalam bidang kesehatan dititik beratkan pada prioritas pikiran misi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, terutama misi kedua yaitu: Membangun sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Misi ini ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter dengan mencukupi kebutuhan sarana prasarana fasilitas kesehatan, peningkatan sanitasi masyarakat, kapasitas tenaga kesehatan, ketersediaan air bersih, penciptaan lingkungan sehat, dan upaya promotif dan preventif kesehatan lainnya. Untuk mendukung misi tersebut, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjabarkan misi kepala daerah tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi
2. Meningkatkan keluarga sehat dan sadar gizi serta upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan.
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau oleh Masyarakat.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021- 2026 sebagai upaya dalam menjabarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode Tahun 2021-2026, terutama misi kedua, yaitu Membangun Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing. Selanjutnya dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas

Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, diperlukan penetapan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang menjadi dasar penyusunan kinerja Dinas Kesehatan untuk lima tahun mendatang.

Tujuan adalah implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh organisasi perangkat daerah di masa mendatang dalam jangka waktu sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada permasalahan dan isu-isu strategis. Untuk menjabarkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021-2026, maka tujuan pembangunan kesehatan 2021-2026 adalah sebagai penggerak pembangunan kesehatan menuju terwujudnya masyarakat yang sehat, produktif, mandiri dan sejahtera adalah mewujudkan sumber daya manusia yang sehat.

Berdasarkan tujuan pembangunan bidang kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka ditetapkan tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021-2026 yaitu :

1. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Pada Faskes dan RS
2. Meningkatnya Pelayanan Publik dan Budaya Kerja

4.2 SASARAN PERANGKAT DAERAH

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan secara nyata oleh organisasi perangkat daerah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Dalam menetapkan sasaran dirancang pula indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja sasaran digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator kinerja sasaran disertai dengan rencana target tingkat capaiannya. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Dalam rangka pencapaian tujuan, maka ditetapkan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang tahun 2021-2026, sebagai berikut

1. Peningkatan kesehatan masyarakat, dengan indikator sasaran :
 - a. Indeks keluarga sehat dari 0,20% pada tahun 2021 menjadi 0,70% pada tahun 2026
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, dengan indikator sasaran :
 - a. Indeks kepuasan masyarakat dari 89,25% pada tahun 2021 menjadi 89,50% pada tahun 2026
3. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, dengan indikator sasaran :
 - a. Predikat LAKIP dari CC pada tahun 2021 menjadi A pada tahun 2026
 - b. Laporan keuangan sesuai SAP dari sesuai pada tahun 2021 menjadi sesuai pada tahun 2026

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Pada Faskes dan RS		Usia Harapan Hidup	tahun	66,23	66,50	66,75	67	67,25	67,50	67,75	67,75
		Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Indeks Keluarga Sehat	%	0,20	0,20	0,30	0,50	0,70	0,80	0,90	0,90
2	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Budaya Kerja		Indeks Pelayanan Publik	%	NA	2,6	2,9	3,2	3,4	3,6	3,8	3,8
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	89,25	89,25	89,30	89,35	89,40	89,45	89,50	89,50
		Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Predikat AKIP	Prediket	CC	CC	B	B	BB	BB	A	A
			Laporan Keuangan Sesuai SAP	Kesesuaian	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah selama 5 tahun kedepan untuk pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah serta upaya mengatasi pemasalahan. Cara atau langkah merumuskan strategi lebih bersifat makro yang dijabarkan ke dalam rangkaian kebijakan dan program. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memegang prinsip sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan arah pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dengan sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan dalam upaya mewujudkan visi pembangunan daerah.

Sedangkan arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun guna mencapai sasaran rencana strategis secara bertahap. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah.

Strategi dan kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah suatu cara untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah serta target kinerja (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.

Kebijakan merupakan penguatan yang diambil sebagai langkah untuk mencapai target capaian dan sasaran yang telah ditetapkan, seperti yang telah dijabarkan di atas tentang strategi yang akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Kebijakan diambil dengan melihat permasalahan yang ada di masyarakat yang

kemudian di indentifikasi melalui review pelaksanaan kebijakan sebelumnya. Adapun arah kebijakan yang diambil Dinas Kesehatan dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan adalah :

1. Penguatan pelayanan kesehatan menggunakan pendekatan siklus hidup
2. Melakukan percepatan perbaikan gizi masyarakat
3. Meningkatkan pencegahan faktor risiko, deteksi dini dan aksi multisektor (GERMAS) dalam meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit.
4. Meningkatkan upaya kesehatan lingkungan
5. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan upaya kesehatan masyarakat tanpa meninggalkan upaya kesehatan perorangan
6. Meningkatkan sinergi lintas program, lintas sektor dan swasta dalam pelaksanaan program kesehatan.
7. Memperkuat pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan milik pemerintah.
8. Mendukung pembangunan dan pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan berikut ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan.
9. Memenuhi ketersediaan obat-obatan termasuk vaksin dan perbekalan kesehatan.
10. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan
11. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia kesehatan
12. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja OPD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya.
13. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan
14. Penggunaan sistem aplikasi dalam penyelenggaraan penganggaran, pendapatan, aset, data dan informasi pembangunan dan kinerja

Berdasarkan sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka ditetapkan strategi sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kesehatan masyarakat

Sasaran peningkatan kesehatan masyarakat, dilaksanakan melalui strategi:

- a. Meningkatkan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
 - b. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan lintas sektor dalam pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat
- 2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat
- Sasaran peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dilaksanakan melalui strategi :
- a. Meningkatkan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan dan kompetensi sesuai standar
 - b. Meningkatkan ketersediaan fasyankes dasar dan rujukan
 - c. Meningkatkan fasilitas kefarmasian, alat kesehatan dan makanan sesuai standar
- 3) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
- Sasaran peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, dilaksanakan melalui strategi :
- a. Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
 - b. Peningkatan kualitas dan tata Kelola keuangan dan pelaporan
 - c. Penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

Tabel 5.1
Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026

Visi	: Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat								
Misi	: Membangun Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing								
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Pada Faskes dan RS	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penguatan pelayanan kesehatan menggunakan pendekatan siklus hidup					
				Melakukan percepatan perbaikan gizi masyarakat					
				Meningkatkan pencegahan faktor risiko, deteksi dini dan aksi multisektor (GERMAS) dalam meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit.	Meningkatkan pencegahan faktor risiko, deteksi dini dan aksi multisektor (GERMAS) dalam meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit.	Meningkatkan pencegahan faktor risiko, deteksi dini dan aksi multisektor (GERMAS) dalam meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit.	Meningkatkan pencegahan faktor risiko, deteksi dini dan aksi multisektor (GERMAS) dalam meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit.	Meningkatkan pencegahan faktor risiko, deteksi dini dan aksi multisektor (GERMAS) dalam meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit.	Meningkatkan pencegahan faktor risiko, deteksi dini dan aksi multisektor (GERMAS) dalam meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit.
				Meningkatkan upaya kesehatan lingkungan					
				Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan upaya kesehatan masyarakat tanpa meninggalkan upaya kesehatan perorangan	Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan upaya kesehatan masyarakat tanpa meninggalkan upaya kesehatan perorangan	Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan upaya kesehatan masyarakat tanpa meninggalkan upaya kesehatan perorangan	Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan upaya kesehatan masyarakat tanpa meninggalkan upaya kesehatan perorangan	Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan upaya kesehatan masyarakat tanpa meninggalkan upaya kesehatan perorangan	Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan upaya kesehatan masyarakat tanpa meninggalkan upaya kesehatan perorangan
				Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan lintas sektor dalam pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat	Meningkatkan sinergi lintas program, lintas sektor dan swasta dalam pelaksanaan program kesehatan.	Meningkatkan sinergi lintas program, lintas sektor dan swasta dalam pelaksanaan program kesehatan.	Meningkatkan sinergi lintas program, lintas sektor dan swasta dalam pelaksanaan program kesehatan.	Meningkatkan sinergi lintas program, lintas sektor dan swasta dalam pelaksanaan program kesehatan.	Meningkatkan sinergi lintas program, lintas sektor dan swasta dalam pelaksanaan program kesehatan.
				Meningkatkan sinergi lintas program, lintas sektor dan swasta dalam pelaksanaan program kesehatan.	Meningkatkan sinergi lintas program, lintas sektor dan swasta dalam pelaksanaan program kesehatan.	Meningkatkan sinergi lintas program, lintas sektor dan swasta dalam pelaksanaan program kesehatan.	Meningkatkan sinergi lintas program, lintas sektor dan swasta dalam pelaksanaan program kesehatan.	Meningkatkan sinergi lintas program, lintas sektor dan swasta dalam pelaksanaan program kesehatan.	Meningkatkan sinergi lintas program, lintas sektor dan swasta dalam pelaksanaan program kesehatan.

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Budaya Kerja	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat	Meningkatkan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan dan kompetensi sesuai standar	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia kesehatan	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia kesehatan	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia kesehatan	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia kesehatan	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia kesehatan	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia kesehatan
			Meningkatkan ketersediaan fasyankes dasar dan rujukan	Memperkuat pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan milik pemerintah;	Memperkuat pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan milik pemerintah;	Memperkuat pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan milik pemerintah;	Memperkuat pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan milik pemerintah;	Memperkuat pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan milik pemerintah;	Memperkuat pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan milik pemerintah;
				Mendukung pembangunan dan pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan berikut ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan.	Mendukung pembangunan dan pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan berikut ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan.	Mendukung pembangunan dan pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan berikut ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan.	Mendukung pembangunan dan pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan berikut ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan.	Mendukung pembangunan dan pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan berikut ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan.	Mendukung pembangunan dan pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan berikut ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan.
			Meningkatkan fasilitas kefarmasian, alat kesehatan dan makanan sesuai standar	Memenuhi ketersediaan obat-obatan termasuk vaksin dan perbekalan kesehatan;	Memenuhi ketersediaan obat-obatan termasuk vaksin dan perbekalan kesehatan;	Memenuhi ketersediaan obat-obatan termasuk vaksin dan perbekalan kesehatan;	Memenuhi ketersediaan obat-obatan termasuk vaksin dan perbekalan kesehatan;	Memenuhi ketersediaan obat-obatan termasuk vaksin dan perbekalan kesehatan;	Memenuhi ketersediaan obat-obatan termasuk vaksin dan perbekalan kesehatan;
				Meningkatkan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan.					
		Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja OPD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja OPD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja OPD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja OPD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja OPD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya	
			Peningkatan kualitas dan tata Kelola keuangan dan pelaporan	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan					
			Penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Penggunaan sistem aplikasi dalam penyelenggaraan penganggaran, pendapatan, aset, data dan informasi pembangunan dan kinerja	Penggunaan sistem aplikasi dalam penyelenggaraan penganggaran, pendapatan, aset, data dan informasi pembangunan dan kinerja	Penggunaan sistem aplikasi dalam penyelenggaraan penganggaran, pendapatan, aset, data dan informasi pembangunan dan kinerja	Penggunaan sistem aplikasi dalam penyelenggaraan penganggaran, pendapatan, aset, data dan informasi pembangunan dan kinerja	Penggunaan sistem aplikasi dalam penyelenggaraan penganggaran, pendapatan, aset, data dan informasi pembangunan dan kinerja	Penggunaan sistem aplikasi dalam penyelenggaraan penganggaran, pendapatan, aset, data dan informasi pembangunan dan kinerja

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini adalah acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan mengutamakan kegiatan pembangunan kesehatan pada upaya promotif dan preventif, yang dilaksanakan secara serasi dengan upaya kuratif dan rehabilitatif. Program dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 ini telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan menjadi program prioritas RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026. Rencana program prioritas selanjutnya dijabarkan oleh Dinas Kesehatan ke dalam rencana kegiatan dan sub kegiatan pada setiap program. Pemilihan kegiatan dan sub kegiatan pada masing-masing program didasarkan atas tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Kesehatan yang telah ditetapkan. Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kurun waktu tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini diarahkan pada peningkatan capaian rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk; persentase rumah sakit rujukan

terakreditasi minimal strata utama; dan capaian 12 indikator kinerja jenis pelayanan pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, dengan fokus kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - (1) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya;
 - (2) Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas;
 - (3) Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya;
 - (4) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas;
 - (5) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya;
 - (6) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - (7) Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - (8) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - (9) Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi;
 - (10) Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin;
 - (11) Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai;
 - (12) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- 2) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - (1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Dinkes dan 17 Puskesmas);
 - (2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Dinkes dan 17 Puskesmas);
 - (3) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Dinkes dan 17 Puskesmas);
 - (4) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (Dinkes dan 17 Puskesmas);

- (5) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Dinkes dan Puskesmas);
- (6) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Dinkes dan 17 Puskesmas);
- (7) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Dinkes dan 17 Puskesmas);
- (8) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (Dinkes dan 17 Puskesmas);
- (9) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (Dinkes dan 17 Puskesmas);
- (10) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Dinkes dan 17 Puskesmas);
- (11) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Dinkes dan 17 Puskesmas);
- (12) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (Dinkes dan 17 Puskesmas);
- (13) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana (Dinkes dan 17 Puskesmas);
- (14) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dinkes dan 17 Puskesmas);
- (15) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga;
- (16) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan;
- (17) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan;
- (18) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya;
- (19) Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan;
- (20) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA;
- (21) Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus;

- (22) Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular;
- (23) Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat;
- (24) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas Muara Sabak Barat;
- (25) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas Simpang Pandan;
- (26) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas Simpang Tuan;
- (27) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas Muara Sabak Timur;
- (28) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas Simbur Naik;
- (29) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas Lambur;
- (30) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas Kampung Laut;
- (31) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas Dendang;
- (32) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas Rantau Rasau;
- (33) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas Sungai Tering;
- (34) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas Nipah Panjang;
- (35) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas Mendahara;
- (36) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas Pangkal Duri;
- (37) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas Berbak;
- (38) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas Sungai Lokan;
- (39) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas Sungai Jambat;
- (40) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas Air Hitam Laut
- (41) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya;
- (42) Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota;

3) Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi

- (1) Sub Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan;
- (2) Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan;
- (3) Sub Kegiatan Pengadaan Alat/ Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet.

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diarahkan untuk peningkatan rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk, dengan fokus kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
 - (1) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan.
- 2) Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
 - (1) Sub Kegiatan Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - (2) Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar;
 - (3) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- 3) Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - (1) Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program ini diarahkan pada peningkatan capaian persentase sarana kefarmasian, alkes dan PIRT yang memenuhi standar, dengan fokus kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
 - (1) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).
- 2) Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

(1) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga.

3) Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

(1) Sub Kegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan.

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini diarahkan untuk peningkatan cakupan desa siaga aktif, dengan fokus kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

(1) Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat.

2) Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

(1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat.

3) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

(1) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM).

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Program ini diarahkan untuk peningkatan Nilai Sakip dan Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pematang Jaya, dengan fokus kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- (1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - (2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- (1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - (2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
- 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- (1) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - (2) Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.
- 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- (1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - (2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - (3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - (4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - (5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - (6) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - (7) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - (8) Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- (1) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel;
 - (2) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - (3) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - (4) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

- 7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - (1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - (2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - (3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - (1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - (2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - (3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - (4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

Rincian target kinerja dan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari kurun waktu tahun 2021-2026 dapat dilihat pada lampiran

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode Tahun 2021–2026 menjadi dasar bagi seluruh Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah periode Tahun 2021–2026. Dengan demikian indikator capaian pembangunan daerah yang ada dalam RPJMD menjadi dasar bagi setiap perangkat daerah dalam mencapai indikator sasaran program/kegiatan. Untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan analisis penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama. Oleh karena itu capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah ditetapkan untuk mendukung tercapainya Indikator Kinerja Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016-2021, maka Dinas Kesehatan telah menyusun indikator kinerja yang mana telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016-2021 diantaranya sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja pada awal periode	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke						Kondisi kinerja pada akhir periode
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Usia harapan hidup (tahun)	66,23	66,50	66,75	67	67,25	67,50	67,75	67,75
2	Indeks keluarga sehat (persen)	0,20	0,30	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	0,90
3	Indeks pelayan public (persen)	NA	2,6	2,9	3,2	3,4	3,6	3,8	3,8
4	Predikat AKIP (predikat)	CC	CC	B	B	BB	BB	A	A
5	Laporan keuangan sesuai SAP (kesesuaian)	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai

Selain indikator kinerja utama, ditetapkan juga indikator kinerja kunci (IKK) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pada Peraturan tersebut, terdapat indikator kinerja kunci urusan kesehatan kabupaten/kota sebanyak 14 indikator kinerja yang selanjutnya dimasukkan dalam RPJMD dan ditetapkan menjadi indikator kinerja kunci Dinas Kesehatan Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2021-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke						Kondisi kinerja pada akhir periode
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Ibu hamil mendapat pelayanan ibu hamil (%)	89,45	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	64,74	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	96,16	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	82,68	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	76,68	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	22,78	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	87,93	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	13,31	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase penyandang Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	96,24	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke						Kondisi kinerja pada akhir periode
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10	Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	97,47	100	100	100	100	100	100	100
11	Persentase orang dengan Tuberkulosis (TB) mendapatkan pelayanan TB sesuai standar (%)	30,10	100	100	100	100	100	100	100
12	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar (%)	31,52	100	100	100	100	100	100	100
13	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup (KH)	19	19	18	17	16	15	14	14
14	Angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup (KH)	9	8,5	8	7,5	7	6,5	6	6
15	Jumlah kematian ibu (orang)	6	6	6	5	5	4	4	4
16	Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita (%)	4,84	4,65	4,40	4,10	3,9	3,7	3,5	3,5
17	Prevalensi gizi kurang dan gizi buruk (wasting) pada balita (%)	3,8	3,5	3,2	2,9	2,6	2,3	2	2
18	Prevalensi pendek dan sangat pendek (stunting) (%)	20,05	19,05	18,05	17,05	16,05	15,05	14,05	14,05
19	Prevalensi ibu hamil KEK (kekurangan energi kronis) (%)	7,29	7,2	7,11	7,02	6,93	6,84	6,75	6,75
20	Prevalensi obesitas pada penduduk usia +18 tahun (%)	15,43	15	14,5	14	13,5	13	12,5	12,5
21	Prevalensi merokok penduduk < 18 tahun (%)	16	16	15,5	15	14,5	14	13,5	13,5
22	Cakupan penemuan dan penanganan DBD (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
23	Jumlah puskesmas (unit)	17	17	17	17	18	18	18	19
24	Jumlah puskesmas rawat inap (unit)	10	10	10	10	10	11	11	11

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke						Kondisi kinerja pada akhir periode
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
25	Jumlah pustu (unit)	58	59	59	60	60	60	61	61
26	Jumlah polindes (unit)	31	31	31	32	32	33	33	33
27	Jumlah posyandu (unit)	290	290	290	292	293	294	295	295
28	Persentase kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
29	Jumlah puskesmas yang memiliki minimal 9 jenis tenaga kesehatan (unit)	4	8	10	12	14	17	17	17
30	Persentase RS yang terakreditasi (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
31	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
32	Persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi (%)	97,49	96,8	97	97,5	97,7	98	98	98
33	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)	14,5	20	25	30	35	40	45	45
34	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	9,57	10	12	14	16	18	20	20
35	Persentase ASI Eksklusif (%)	62,77	63	65	68	70	72	75	75
36	Persentase keluarga yang mengikuti program keluarga berencana (KB) (%)	NA	80	82	84	86	88	90	90
37	Persentase anggota keluarga tidak ada yang merokok (%)	NA	25	30	35	40	45	50	50
38	Persentase keluarga yang sudah menjadi anggota JKN (%)	66,3	67	70	73	76	79	82	82
39	Persentase keluarga yang mempunyai akses air bersih (%)	65	67	70	73	76	79	82	82
40	Persentase keluarga yang mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat (%)	70	73	76	79	82	85	88	88
41	Persentase desa UCI (%)	92,5	93	93,5	94	94,5	95	95,5	95,5

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 yang berisikan tujuan, sasaran, kebijakan, dan strategi, serta indikator kinerja program/kegiatan diharapkan mampu menjadi acuan dan arah pembangunan kesehatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama kurun waktu 5 tahun ke depan. Renstra yang telah disusun ini diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka penguatan peran serta stakeholders dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja dalam bidang kesehatan.

Pencapaian target indikator kinerja Renstra Dinas Kesehatan merupakan serangkaian pencapaian indikator kinerja utama dan kunci perangkat daerah serta program prioritas yang termuat dalam Renstra ini. Dalam pelaksanaannya mempertimbangkan seluruh potensi dan kapasitas yang tersedia baik dari pemerintah, swasta maupun masyarakat yang secara sinergis bersama untuk mencapai tujuan perangkat daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2021-2026 melibatkan lintas program terkait baik pusat dan daerah. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan renstra ini diucapkan terima kasih, tentunya Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tahun 2021-2026 ini dapat dilaksanakan dan mencapai tujuannya, bila dilakukan dengan dedikasi yang tinggi dan kerja keras dari segenap aparatur kesehatan dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan pelaksana teknis serta jejaringannya, serta masyarakat.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 ini dibuat, semoga bermanfaat dalam rangka mendukung kelangsungan pembangunan, khususnya pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I											
Matrik Rencana Tingkat Capaian Tujuan dan Sasaran											
Tahun 2021 s/d 2026											
Instansi	: Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur										
Visi	: Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (MERAKYAT)										
Misi 2	: Membangun Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing										
TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN DAN POROGRAM	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL	TARGET INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kematian Ibu	6	6	6	5	5	4	4	
			Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup (KH)	19/ 1.000 KH	19/ 1.000 KH	18.5/ 1.000 KH	18/ 1.000 KH	17.5/ 1.000 KH	17/ 1.000 KH	16.5/ 1.000 KH	
			Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup (KH)	20/ 1.000 KH	20/ 1.000 KH	19.5/ 1.000 KH	19/ 1.000 KH	18.5/ 1.000 KH	18/ 1.000 KH	17.5/ 1.000 KH	
			Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup (KH)	18/ 1.000 KH	18/ 1.000 KH	17.5/ 1.000 KH	17/ 1.000 KH	17.5/ 1.000 KH	16/ 1.000 KH	16.5/ 1.000 KH	
			Persentase Pelayanan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	64,74 %	75	80	85	90	95	100	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga PHBS	49,40	49,98	50,55	51,13	51,70	52,28	52,85	
Meningkatnya Pelayanan Publik dan Budaya Kerja	1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	76,61%	76,63%	76,66%	76,70%	76,75%	76,81%	76,88%	
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	NA	62,5%	70%	77,5%	85%	92,5%	100%
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Jumlah Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	4 pkm	8 PKM	10 PKM	12 PKM	14 PKM	17 PKM	17 PKM	
			Persentase Ketersediaan Obat, Vaksin di Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	2. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	89,23	89,25	89,3	89,35	89,40	89,45	89,50	
			Indeks Pelayanan Instansi	NA	78	81	84	88,31	88,6	89	

**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2021-2026**

Visi : Kemandirian Masyarakat Untuk Hidup Sehat
Misi 2 : Membangun Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Kondisi Kinerja Awal		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PELAKSANA	LOKASI			
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD		
			Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)			Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kematian Ibu	6	49.795.563.180	6	42.579.391.786	5	49.799.692.793	5	52.978.471.434	4	54.195.627.722	4	54.033.777.267	4	225.823.510.083		DINKES			
		Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup (KH)	19/ 1.000 KH		18,5/ 1.000 KH		18/ 1.000 KH		17,5/ 1.000 KH		17/ 1.000 KH		16,5/ 1.000 KH		16,5/ 1.000 KH						
		Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup (KH)	20/ 1.000 KH		19,5/ 1.000 KH		19/ 1.000 KH		18,5/ 1.000 KH		18/ 1.000 KH		17,5/ 1.000 KH		17,5/ 1.000 KH						
		Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup (KH)	18/ 1.000 KH		17,5/ 1.000 KH		17/ 1.000 KH		17,5/ 1.000 KH		16/ 1.000 KH		16,5/ 1.000 KH		16,5/ 1.000 KH						
		Persentase Pelayanan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	64,74%	75	80	85	90	95	100	100	100	100	100	100	100						
1.02.02.01	A. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai Standar	60%	15.614.431.645	65%	10.196.124.212	68%	18.946.435.372	70%	19.001.889.341	73%	16.817.471.798	75%	13.318.791.567	75%	84.071.915.655		Bidang YANKES dan SDK			
		Persentase ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Bidang YANKES dan SDK			
1.02.02.2.01.02	1. Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	0	0	1 Unit	7.448.437.308	1 unit	8.000.000.000	0	0	0	14 Unit	15.448.437.308				Bidang YANKES dan SDK			
1.02.02.2.01.02	1. Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	2 Unit	4.783.279.638	0	0	0	1 Unit	1.059.091.541	1 Unit	1.967.471.798	1 Unit	1.593.791.567	14 Unit	9.403.634.544			Bidang YANKES dan SDK			
1.02.02.2.01.03	2. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	0	0	0	0	0	0	0	1 Unit	1.500.000.000	1 Unit	1.000.000.000	4 Unit	2.500.000.000			Bidang YANKES dan SDK			
1.02.02.2.01.09	3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	400.000.000	0	0	1 Unit	400.000.000	1 Unit	500.000.000	2 Unit	2.000.000.000	2 Unit	1.000.000.000	7 Unit	4.300.000.000			Bidang YANKES dan SDK		
1.02.02.2.01.10	4. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	0	0	0	1 Unit	650.000.000	1 Unit	500.000.000	4 Unit	2.000.000.000	3 Unit	1.800.000.000	7 Unit	4.950.000.000			Bidang YANKES dan SDK			
1.02.02.2.01.11	5. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	0	0	0	5 Unit	500.000.000	0	0	5 Unit	500.000.000	5 Unit	500.000.000	15 Unit	1.500.000.000			Bidang YANKES dan SDK			
1.02.02.2.01.12	6. Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	0	0	0	0	0	0	1.000.000.000	0	0	1.500.000.000	1.500.000.000	4.000.000.000				Bidang YANKES dan SDK			
1.02.02.2.01.13	7. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	0	0	3.573.228.280	2.500.000.000	1.750.000.000	1.750.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	26.189.200.900				Bidang YANKES dan SDK			
1.02.02.2.01.14	8. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	8.189.200.900	4.000.000.000	5.000.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	893.944.296				Bidang YANKES dan SDK			
1.02.02.2.01.15	9. Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	99.016.500	165.631.932	132.998.064	146.297.800	150.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	9.545.256.720				Bidang YANKES dan SDK			
1.02.02.2.01.16	10. Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	100%	1.523.336.000	100%	1.471.920.720	1.500.000.000	100%	1.650.000.000	100%	1.700.000.000	100%	1.700.000.000	100%	1.700.000.000	100%	9.545.256.720			Bidang YANKES dan SDK	
1.02.02.2.01.17	11. Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	559.675.000	985.343.280	750.000.000	825.000.000	850.000.000	875.000.000	4.845.018.280	496.423.607	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000			Bidang YANKES dan SDK	
1.02.02.2.01.20	12. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	59.923.607	65.000.000	65.000.000	71.500.000	71.500.000	71.500.000	71.500.000	71.500.000	71.500.000	71.500.000	71.500.000	71.500.000	71.500.000	71.500.000	71.500.000	71.500.000			Bidang YANKES dan SDK
1.02.02.2.02	B. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	89,45%	100%	34.181.131.535	100%	32.383.267.574	100%	30.853.257.421	100%	33.976.582.093	100%	37.378.155.924	100%	40.714.985.700	100%	141.751.594.428		Bidang Kesmas		
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	64,74%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Bidang Kesmas
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	96,16%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Bidang Kesmas

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Kondisi Kinerja Awal		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PELAKSANA	LOKASI									
			2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD												
			Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)			Kinerja	Rp (ribu)							
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	82,68%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Bidang Kesmas								
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	76,98%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%										
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	22,78%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%										
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	87,93%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%										
		Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	13,31%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Bidang P2P								
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	96,24%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Bidang P2P								
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	97,49%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Bidang P2P								
		Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	30,10%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Bidang P2P								
		Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	31,52%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Bidang P2P								
		Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	7,29%		7,20%		7,11%		7,02%		6,93%		6,84%		6,75%		6,75%										
		Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita	3,8%		3,5%		3,2%		2,9%		2,6%		2,3%		2%		2%										
		Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat Pendek) pada balita	20,05%		19,05%		18,05%		17,05%		16,05%		15,05%		14,05%		14,05%										
		Persentase Desa UCI/ Kelurahan UCI	95,5%		80%		85%		90%		95%		100%		100%		100%										
		Persentase anggota keluarga tidak ada yang merokok	69,72%		70%		73%		76%		79%		82%		85%		85%										
		Persentase keluarga mempunyai akses sarana air bersih	65%		67		70		72		75		77		80		80										
		Cakupan Desa Terhadap Sanitasi Layak	69,72%		71		73		75		77		80		85		85										
		Persentase Balita 0-6 Bulan Mendapatkan ASI Eksklusif	62,77		63		64		65		66		67		68		68										
		Jumlah Posyandu Aktif	221		225		229		234		239		244		250		250										
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	91%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%										
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan pasien Masyarakat Miskin	6,3%		5,8%		5,5%		5,2%		4,9%		4,6%		4,3%		4,3%										
		Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu yang diintegrasikan sebagai Peserta JKN KIS	68%		70%		75%		80%		85%		90%		95%												
1.02.02.2.02.01	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (DINKES)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.827		5.598	1.330.528.250		6.166	134.948.447		6.734	116.200.142.00		7.302	127.820.150.00		7.870	140.602.150.00		8.438	154.662.400.00		8.438	2.004.761.530	Dinkes	
	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Muara Sabak Barat)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	312		348	-		393	94.764.600		438	104.241.060.00		483	114.665.150.00		528	126.131.650.00		573	138.744.800.00		573		Puskesmas Muara Sabak Barat	
	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Simpan Pandan)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	406		417	-		473	55.495.000		529	61.044.500.00		585	67.148.950.00		641	73.863.800.00		697	81.250.150.00		697		Puskesmas Simpan Pandan	

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Kondisi Kinerja Awal		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	PELAKSANA	LOKASI	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026					
			Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)				
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Simpang Tuan)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	323		211	-	300	49.545.000	389	54.499.500,00	478	59.949.450,00	567	65.944.300,00	656	72.538.750,00	656		Puskesmas Simpang Tuan	
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Muara Sabak Timur)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	261		249	-	300	51.362.998	351	56.499.290,00	402	62.149.219,00	453	68.364.100,00	504	75.200.500,00	504		Puskesmas Muara Sabak Timur	
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Simbur Naik)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	94		87	-	89	55.655.000	91	61.220.500,00	93	67.342.550,00	95	74.076.800,00	97	81.484.450,00	97		Puskesmas Simbur Naik	
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Lambur)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	196		144	-	196	53.325.000	248	58.657.500,00	300	64.523.250,00	352	70.975.500,00	404	78.073.050,00	404		Puskesmas Lambur	
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Kampung Laut)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	257		233		262	114.406.000	291	125.846.600,00	320	138.431.260,00	349	152.274.350,00	378	167.501.800,00	378		Puskesmas Kampung Laut	
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Dendang)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	264		273		299	54.890.000	325	60.379.000,00	351	66.416.900,00	377	73.058.550,00	403	80.364.400,00	403		Puskesmas Dendang	
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Rantau Rasau)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	415		411		452	77.336.800	493	85.070.480,00	534	93.577.500,00	575	102.935.250,00	616	113.228.750,00	616		Puskesmas Rantau Rasau	
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Sungai Tering)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	89		84		101	193.190.000	118	212.509.000,00	135	233.759.900,00	152	257.135.850,00	169	282.849.400,00	169		Puskesmas Sungai Tering	
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Nipah Panjang)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	360		368		375	34.171.550	382	37.588.705,00	389	41.347.550,00	396	45.482.300,00	403	50.030.500,00	403		Puskesmas Nipah Panjang	
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Mendahara)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	384		339		401	60.000.000	463	66.000.000,00	525	72.600.000,00	587	79.860.000,00	649	87.846.000,00	649		Puskesmas Mendahara	
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Pangkal Duri)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	77		51		78	26.160.000	105	28.776.000,00	132	31.653.600,00	159	34.818.950,00	186	38.300.850,00	186		Puskesmas Pangkal Duri	
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Berbak)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	174		147		193	76.922.500	239	84.614.750,00	285	93.076.225,00	331	102.383.800,00	377	112.622.200,00	377		Puskesmas Berbak	
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Sungai Lokan)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	66		58		69	31.190.000	80	34.309.000,00	91	37.739.900,00	102	41.513.850,00	113	45.665.200,00	113		Puskesmas Sungai Lokan	
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Sungai Jambat)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	78		82		88	116.200.142	94	127.820.150,00	100	140.602.100,00	106	154.662.300,00	112	170.128.500,00	112		Puskesmas Sungai Jambat	
18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Air Hitam Laut)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	71		75		75	48.345.000	75	53.179.500,00	75	58.497.450,00	75	64.347.200,00	75	70.781.900,00	75		Puskesmas Air Hitam Laut	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (DINKES)	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.477		4.724		5.976	192.256.000	6.167	41.900.000,00	6.735	46.090.000,00	7.303	50.699.000,00	7.871	55.768.900,00		386.713.900	Dinkes	
20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Puskesmas Muara Sabak Barat)	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	306		352		375	16.350.000	393	17.985.000,00	438	19.783.500,00	483	21.761.850,00	528	23.938.000,00			Puskesmas Muara Sabak Barat	
21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Puskesmas Simpang Pandan)	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	406		444		451	92.225.600	473	101.448.160,00	529	111.592.976,00	585	122.752.250,00	641	135.027.500,00			Puskesmas Simpang Pandan	
22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Puskesmas Simpang Tuan)	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	213		234		286	5.435.000	300	5.978.500,00	389	6.576.350,00	478	7.233.900,00	567	7.957.300,00			Puskesmas Simpang Tuan	
23	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Puskesmas Muara Sabak Timur)	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	158		151		286	13.362.990	300	14.699.289,00	351	16.169.200,00	402	17.786.100,00	453	19.564.700,00			Puskesmas Muara Sabak Timur	
24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Puskesmas Simbur Naik)	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	41		60		85	13.035.000	89	14.338.500,00	91	15.772.350,00	93	17.349.550,00	95	19.084.500,00			Puskesmas Simbur Naik	
25	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Puskesmas Lambur)	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	113		108		187	8.800.000	196	9.680.000,00	248	10.648.000,00	300	11.712.800,00	352	12.884.050,00			Puskesmas Lambur	
26	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Puskesmas Kampung Laut)	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	234		176		250	6.200.000	262	6.820.000,00	291	7.502.000,00	320	8.252.200,00	349	9.077.450,00			Puskesmas Kampung Laut	

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Kondisi Kinerja Awal		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PELAKSANA	LOKASI	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD
			Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)			Kinerja
	27	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Puskesmas Dendang)	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	182		227		286	5.800.000	299	6.380.000,00	325	7.018.000,00	351	7.719.800,00	377	8.491.800,00		Puskesmas Dendang
	28	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Puskesmas Rantau Rasau)	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	294		325		432	27.000.000	452	29.700.000,00	493	32.670.000,00	534	35.937.000,00	575	39.530.700,00		Puskesmas Rantau Rasau
	29	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Puskesmas Sungai Tering)	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	35		53		96	43.720.000	101	48.092.000,00	118	52.901.200,00	135	58.191.350,00	152	64.010.500,00		Puskesmas Sungai Tering
	30	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Puskesmas Nipah Panjang)	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	142		134		358	24.038.248	375	26.442.000,00	382	29.086.200,00	389	31.994.850,00	396	35.194.500,00		Puskesmas Nipah Panjang
	31	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Puskesmas Mendahara)	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	195		229		382	8.700.000	401	9.570.000,00	463	10.527.000,00	525	11.579.700,00	587	12.737.650,00		Puskesmas Mendahara
	32	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Puskesmas Pangkal Duri)	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	19		11		74	11.550.000	78	12.705.000,00	105	13.975.500,00	132	15.373.050,00	159	16.910.500,00		Puskesmas Pangkal Duri
	33	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Puskesmas Berbak)	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	56		89		184	9.000.000	193	9.900.000,00	239	10.890.000,00	285	11.979.000,00	331	13.176.900,00		Puskesmas Berbak
	34	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Puskesmas Sungai Lokan)	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	30		35		66	4.800.000	69	5.280.000,00	80	5.808.000,00	91	6.388.800,00	102	7.027.650,00		Puskesmas Sungai Lokan
	35	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Puskesmas Sungai Jambat)	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	30		32		84	2.560.000	88	2.816.000,00	94	3.097.600,00	100	3.407.350,00	106	3.748.100,00		Puskesmas Sungai Jambat
	36	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Puskesmas Air Hitam Laut)	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	23		43		72	41.900.000	75	46.090.000,00	75	50.699.000,00	75	55.768.900,00	75	61.345.750,00		Puskesmas Air Hitam Laut
1.02.02.2.02.03	37	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (DINKES)	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.566		4.724		5.976		6.167	44.000.000	6.735	48.400.000,00	7.303	53.240.000,00	7.871	58.564.000,00	204.204.000	Dinkes
	38	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Puskesmas Muara Sabak Barat)	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	311		352		375	8.748.000	393	9.622.800,00	438	10.585.080,00	483	11.643.550,00	528	12.807.900,00		Puskesmas Muara Sabak Barat
	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Puskesmas Simpang Pandan)	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	412		444		451	108.949.800	473	119.844.780,00	529	131.829.250,00	585	145.012.175,00	641	159.513.500,00		Puskesmas Simpang Pandan
	40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Puskesmas Simpang Tuan)	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	288		234		286	9.150.000	300	10.065.000,00	389	11.071.500,00	478	12.178.650,00	567	13.396.500,00		Puskesmas Simpang Tuan
	41	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Puskesmas Muara Sabak Timur)	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	263		151		286		300	20.500.000,00	351	22.550.000,00	402	24.805.000,00	453	27.285.500,00		Puskesmas Muara Sabak Timur
	42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Puskesmas Simbur Naik)	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	76		60		85	21.680.000	89	23.848.000,00	91	26.232.800,00	93	28.856.050,00	95	31.741.600,00		Puskesmas Simbur Naik
	43	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Puskesmas Lambur)	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	144		108		187	8.800.000	196	9.680.000,00	248	10.648.000,00	300	11.712.800,00	352	12.884.100,00		Puskesmas Lambur
	44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Puskesmas Kampung Laut)	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	263		176		250	4.800.000	262	5.280.000,00	291	5.808.000,00	320	6.388.800,00	349	7.027.650,00		Puskesmas Kampung Laut
	45	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Puskesmas Dendang)	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	221		227		286	11.600.000	299	12.760.000,00	325	14.036.000,00	351	15.439.600,00	377	16.983.550,00		Puskesmas Dendang
	46	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Puskesmas Rantau Rasau)	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	377		325		432	10.900.000	452	11.990.000,00	493	13.189.000,00	534	14.507.900,00	575	15.958.700,00		Puskesmas Rantau Rasau

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Kondisi Kinerja Awal		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PELAKSANA	LOKASI		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	
			Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)			Kinerja	Rp (ribu)
47	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Puskesmas Sungai Tering)	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	70	53	96	26.960.000	101	29.656.000,00	118	32.621.600,00	135	35.883.750,00	152	39.472.100,00					Puskesmas Sungai Tering	
48	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Puskesmas Nipah Panjang)	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	341	134	358	9.320.000	375	10.252.000,00	382	11.277.200,00	389	12.404.950,00	396	13.645.400,00					Puskesmas Nipah Panjang	
49	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Puskesmas Mendahara)	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	322	229	382	10.200.000	401	11.220.000,00	463	12.342.000,00	525	13.576.200,00	587	14.933.800,00					Puskesmas Mendahara	
50	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Puskesmas Pangkal Duri)	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	66	11	74	1.760.000	78	1.936.000,00	105	2.129.600,00	132	2.342.550,00	159	2.576.800,00					Puskesmas Pangkal Duri	
51	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Puskesmas Berbak)	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	168	89	184	18.000.000	193	19.800.000,00	239	21.780.000,00	285	23.958.000,00	331	26.353.800,00					Puskesmas Berbak	
52	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Puskesmas Sungai Lokan)	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	78	35	66	6.000.000	69	6.600.000,00	80	7.260.000,00	91	7.986.000,00	102	8.784.600,00					Puskesmas Sungai Lokan	
53	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Puskesmas Sungai Jambak)	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	99	32	84	17.500.000	88	19.250.000,00	94	21.175.000,00	100	23.292.500,00	106	25.621.750,00					Puskesmas Sungai Jambak	
54	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Puskesmas Air Hitam Laut)	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	67	43	72	44.000.000	75	48.400.000,00	75	53.240.000,00	75	58.564.000,00	75	64.420.400,00					Puskesmas Air Hitam Laut	
1.02.02.2.02.04	55	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (DINKES)	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.652	12.931	912.656	67.748.096	926.317	46.500.935,00	940.182	51.151.000,00	958.947	56.266.100,00	978.086	61.892.750,00			283.558.881	Dinkes	
	56	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (Puskesmas Muara Sabak Barat)	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas		1.257	87.934	187.385.400	89.253	198.628.500,00	90.592	218.491.350,00	92.403	240.340.500,00	94.251	264.374.550,00				Puskesmas Muara Sabak Barat	
	57	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (Puskesmas Simpang Pandan)	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas		1.167	103.657	195.600.000	105.211	207.336.000,00	106.790	228.069.600,00	108.925	250.876.550,00	111.104	275.964.200,00				Puskesmas Simpang Pandan	
	58	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (Puskesmas Simpang Tuan)	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	1.143	527	66.564	84.380.000	67.563	89.442.800,00	68.576	98.387.080,00	69.948	108.225.750,00	71.347	119.048.300,00				Puskesmas Simpang Tuan	
	59	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (Puskesmas Muara Sabak Timur)	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas		1.218	65.754	148.637.998	66.740	157.556.275,00	67.741	173.311.900,00	69.096	190.643.100,00	70.478	209.707.400,00				Puskesmas Muara Sabak Timur	
	60	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (Puskesmas Simbur Naik)	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas		314	19.517	105.745.000	19.810	112.089.700,00	20.107	123.298.650,00	20.509	135.628.500,00	20.920	149.191.350,00				Puskesmas Simbur Naik	
	61	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (Puskesmas Lambur)	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas		584	42.559	175.480.000	43.197	186.008.800,00	43.845	204.609.600,00	44.722	225.070.550,00	45.617	247.577.600,00				Puskesmas Lambur	
	62	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (Puskesmas Kampung Laut)	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas		747	57.264	179.940.000	58.123	190.736.400,00	58.994	209.810.000,00	60.174	230.791.000,00	61.378	253.870.100,00				Puskesmas Kampung Laut	
	63	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (Puskesmas Dendang)	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas		907	65.616	198.400.000	66.601	210.304.000,00	67.600	231.334.400,00	68.952	254.467.850,00	70.331	279.914.650,00				Puskesmas Dendang	
	64	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (Puskesmas Rantau Rasau)	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas		649	99.658	247.400.000	101.153	262.244.000,00	102.670	288.468.400,00	104.724	317.315.250,00	106.818	349.046.800,00				Puskesmas Rantau Rasau	
	65	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (Puskesmas Sungai Tering)	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas		192	22.082	73.965.000	22.414	78.402.900,00	22.750	86.243.150,00	23.205	94.867.450,00	23.669	104.354.200,00				Puskesmas Sungai Tering	
	66	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (Puskesmas Nipah Panjang)	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas		1.262	81.723	15.831.930	82.949	16.781.845,00	84.193	18.460.000,00	85.877	20.306.000,00	87.594	22.336.600,00				Puskesmas Nipah Panjang	
	67	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (Puskesmas Mendahara)	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	133	857	87.499	221.500.000	88.812	234.790.000,00	90.144	258.269.000,00	91.947	284.095.900,00	93.786	312.505.500,00				Puskesmas Mendahara	
	68	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (Puskesmas Pangkal Duri)	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas		376	17.164	137.510.000	17.421	145.760.600,00	17.683	160.336.660,00	18.036	176.370.300,00	18.397	194.007.500,00				Puskesmas Pangkal Duri	

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Kondisi Kinerja Awal		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														PELAKSANA	LOKASI	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD				
			Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)			
69	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (Puskesmas Berbak)	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas			535	42.277	220.306.300	42.911	233.524.678,00	43.555	256.877.100,00	44.426	282.564.800,00	45.315	310.821.500,00			Puskesmas Berbak			
70	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (Puskesmas Sungai Lokan)	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas			193	15.030	80.700.000	15.255	85.542.000,00	15.484	94.096.200,00	15.794	103.505.800,00	16.109	113.856.350,00			Puskesmas Sungai Lokan			
71	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (Puskesmas Sungai Jambat)	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas			134	19.694	5.500.000	19.989	5.830.000,00	20.289	6.413.000,00	20.695	7.054.300,00	21.108	7.759.750,00			Puskesmas Sungai Jambat			
72	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (Puskesmas Air Hitam Laut)	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas			223	16.643	46.500.935	16.893	49.290.950,00	17.146	54.220.000,00	17.489	59.642.000,00	17.839	65.606.200,00			Puskesmas Air Hitam Laut			
1.02.02.2.02.05	73	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (DINKES)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			32.519	131.547.462	13.634	59.034.252	13.809	42.867.496,00	13.987	47.154.200,00	14.227	51.869.600,00	14.472	57.056.550,00	389.529.600		Dinkes	
	74	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Muara Sabak Barat)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas			3.419		1.121	69.060.000	1.138	72.513.000,00	1.155	79.764.300,00	1.178	87.740.700,00	1.202	96.514.750,00			Puskesmas Muara Sabak Barat	
	75	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Simpang Pandan)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas			3.576		1.322	80.210.000	1.342	84.220.500,00	1.362	92.642.550,00	1.389	101.906.800,00	1.417	112.097.500,00			Puskesmas Simpang Pandan	
	76	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Simpang Tuan)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas			2.933		849	39.380.000	862	41.349.000,00	874	45.483.900,00	892	50.032.250,00	910	55.035.500,00			Puskesmas Simpang Tuan	
	77	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Muara Sabak Timur)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas			2.348		838	121.980.000	851	128.079.000,00	864	140.886.900,00	881	154.975.550,00	899	170.473.100,00			Puskesmas Muara Sabak Timur	
	78	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Simbur Naik)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas			557		249	31.700.000	253	33.285.000,00	256	36.613.500,00	262	40.274.850,00	267	44.302.300,00			Puskesmas Simbur Naik	
	79	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Lambur)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas			1.172		543	30.960.000	551	32.508.000,00	559	35.758.800,00	570	39.334.680,00	582	43.268.100,00			Puskesmas Lambur	
	80	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Kampung Laut)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas			1.521		730	125.540.000	741	131.817.000,00	752	144.998.700,00	767	159.498.570,00	783	175.448.400,00			Puskesmas Kampung Laut	
	81	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Dendang)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas			1.539		837	80.368.000	849	84.386.400,00	862	92.825.040,00	879	102.107.500,00	897	112.318.250,00			Puskesmas Dendang	
	82	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Rantau Rasau)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas			3.552		1.271	126.642.800	1.290	132.974.940,00	1.309	146.272.400,00	1.335	160.899.650,00	1.362	176.989.600,00			Puskesmas Rantau Rasau	
	83	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Sungai Tering)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas			755		282	65.600.000	286	68.880.000,00	290	75.768.000,00	296	83.344.800,00	302	91.679.250,00			Puskesmas Sungai Tering	
	84	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Nipah Panjang)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas			2.544		1.042	33.140.472	1.058	34.797.495,00	1.074	38.277.250,00	1.095	42.104.975,00	1.117	46.315.500,00			Puskesmas Nipah Panjang	
	85	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Mendahara)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas			2.711		1.116	86.830.000	1.132	91.171.500,00	1.149	100.288.650,00	1.172	110.317.500,00	1.196	121.349.250,00			Puskesmas Mendahara	
	86	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Pangkal Duri)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas			460		219	33.245.000	222	34.907.250,00	225	38.397.975,00	230	42.237.700,00	235	46.461.450,00			Puskesmas Pangkal Duri	
	87	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Berbak)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas			1.523		539	51.060.000	547	53.613.000,00	555	58.974.300,00	567	64.871.750,00	578	71.358.900,00			Puskesmas Berbak	
	88	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Sungai Lokan)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas			517		192	30.750.000	195	32.287.500,00	197	35.516.250,00	201	39.067.875,00	205	42.974.600,00			Puskesmas Sungai Lokan	

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Kondisi Kinerja Awal		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	PELAKSANA	LOKASI		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026						
			Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)				Kinerja	Rp (ribu)
	89	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Sungai Jambat)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas			646		251	71.220.000	255	74.781.000,00	259	82.259.100,00	264	90.485.000,00	269	99.533.500,00		Puskesmas Sungai Jambat		
	90	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Air Hitam Laut)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas			725		212	42.867.496	215	45.010.850,00	219	49.511.935,00	223	54.463.100,00	227	59.909.400,00		Puskesmas Air Hitam Laut		
1.02.02.2.02.06	91	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (DINKES)	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	45.329		162.322		162.655	52.571.248	165.066	72.591.135	167.512	79.850.200,00	170.823	87.835.250,00	174.200	96.618.700,00	161.300	389.466.533		Dinkes
	92	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Muara Sabak Barat)	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	5.960		13.061		15.511	111.650.700	15.744	122.815.770,00	15.980	135.097.300,00	16.300	148.607.050,00	16.626	163.467.750,00		Puskesmas Muara Sabak Barat		
	93	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Simpang Pandan)	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	1.649		17.006		18.285	8.500.000	18.559	9.350.000,00	18.837	10.285.000,00	19.214	11.313.500,00	19.598	12.444.850,00		Puskesmas Simpang Pandan		
	94	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Simpang Tuan)	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	2.371		13.541		11.742	53.350.000	11.918	58.685.000,00	12.097	64.553.500,00	12.339	71.008.850,00	12.585	78.109.700,00		Puskesmas Simpang Tuan		
	95	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Muara Sabak Timur)	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	2.661		10.929		11.599	113.960.000	11.773	125.356.000,00	11.949	137.891.600,00	12.188	151.680.750,00	12.432	166.848.800,00		Puskesmas Muara Sabak Timur		
	96	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Simbur Naik)	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	1.083		3.932		3.443	46.390.000	3.494	51.029.000,00	3.547	56.131.900,00	3.618	61.745.050,00	3.690	67.919.550,00		Puskesmas Simbur Naik		
	97	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas lambur)	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	3.309		8.207		7.507	76.780.000	7.620	84.458.000,00	7.734	92.903.800,00	7.889	102.194.200,00	8.047	112.413.650,00		Puskesmas lambur		
	98	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Kampung Laut)	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	2.273		10.772		10.101	70.995.000	10.253	78.094.500,00	10.406	85.903.950,00	10.615	94.494.350,00	10.827	103.943.800,00		Puskesmas Kampung Laut		
	99	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Dendang)	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	169		11.057		11.575	32.500.000	11.748	35.750.000,00	11.924	39.325.000,00	12.163	43.257.500,00	12.406	47.583.250,00		Puskesmas Dendang		
	100	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Rantau Rasau)	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	550		17.377		17.579	66.100.000	17.843	72.710.000,00	18.111	79.981.000,00	18.473	87.979.100,00	18.842	96.777.000,00		Puskesmas Rantau Rasau		
	101	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Sungai Tering)	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	3.132		3.736		3.895	91.950.000	3.954	101.145.000,00	4.013	111.259.500,00	4.093	122.385.450,00	4.175	134.624.000,00		Puskesmas Sungai Tering		
	102	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Nipah Panjang)	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	2.143		15.079		14.416	57.725.976	14.632	63.498.500,00	14.851	69.848.350,00	15.148	76.833.150,00	15.451	84.516.500,00		Puskesmas Nipah Panjang		
	103	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Mendahara)	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	2.806		16.083		15.435	49.700.000	15.666	54.670.000,00	15.901	60.137.000,00	16.219	66.150.700,00	16.544	72.765.750,00		Puskesmas Mendahara		
	104	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Pangkal Duri)	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	653		3.235		3.028	40.260.000	3.073	44.286.000,00	3.119	48.714.600,00	3.182	53.586.050,00	3.245	58.944.650,00		Puskesmas Pangkal Duri		
	105	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Berbak)	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	514		7.287		7.458	66.120.000	7.569	72.732.000,00	7.683	80.005.200,00	7.837	88.005.750,00	7.993	96.806.300,00		Puskesmas Berbak		
	106	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Sungai Lokan)	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	398		2.756		2.651	26.090.000	2.691	28.699.000,00	2.731	31.568.900,00	2.786	34.725.800,00	2.842	38.198.400,00		Puskesmas Sungai Lokan		
	107	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Sungai Jambat)	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	14.227		3.277		3.474	15.360.000	3.526	16.896.000,00	3.579	18.585.600,00	3.650	20.444.160,00	3.723	22.488.500,00		Puskesmas Sungai Jambat		

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Kondisi Kinerja Awal		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														PELAKSANA	LOKASI
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
			Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)		
	108	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Air Hitam Laut)	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	1.431	2.966	2.936	72.591.135	2.980	79.850.250,00	3.025	87.835.275,00	3.085	96.618.800,00	3.147	106.280.650,00			Puskesmas Air Hitam Laut		
1.02.02.2.02.07	109	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (DINKES)	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		7.678	11.501	21.761.396	11.501	36.991.135	11.501	40.690.200,00	11.501	44.759.220,00	11.501	49.235.100,00	193.437.051		Dinkes		
	110	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Puskesmas Muara Sabak Barat)	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas		389	11.263	77.657.100	11.432	82.316.526,00	11.604	90.548.170,00	11.836	99.602.900,00	12.073	109.563.150,00			Puskesmas Muara Sabak Barat		
	111	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Puskesmas Simpang Pandan)	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas		775	13.277	61.000.000	13.477	64.660.000,00	13.679	71.126.000,00	13.952	78.238.600,00	14.231	86.062.450,00			Puskesmas Simpang Pandan		
	112	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Puskesmas Simpang Tuan)	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas		572	8.526	29.340.000	8.654	31.100.400,00	8.784	34.210.440,00	8.960	37.631.450,00	9.139	41.394.600,00			Puskesmas Simpang Tuan		
	113	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Puskesmas Muara Sabak Timur)	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas		636	8.422	69.900.000	8.549	74.094.000,00	8.677	81.503.400,00	8.850	89.653.740,00	9.027	98.619.100,00			Puskesmas Muara Sabak Timur		
	114	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Puskesmas Simbur Naik)	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas		165	2.500	24.010.000	2.537	25.450.600,00	2.576	27.995.660,00	2.627	30.795.250,00	2.680	33.874.750,00			Puskesmas Simbur Naik		
	115	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Puskesmas Lambur)	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas		654	5.451	49.570.000	5.533	52.544.200,00	5.616	57.798.620,00	5.728	63.578.450,00	5.843	69.936.300,00			Puskesmas Lambur		
	116	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Puskesmas Kampung Laut)	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas		365	7.335	57.250.000	7.445	60.685.000,00	7.557	66.753.500,00	7.708	73.428.850,00	7.862	80.771.700,00			Puskesmas Kampung Laut		
	117	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Puskesmas Dendang)	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas		606	8.405	71.310.000	8.531	75.588.600,00	8.659	83.147.460,00	8.832	91.462.200,00	9.009	100.608.500,00			Puskesmas Dendang		
	118	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Puskesmas Rantau Rasau)	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas		685	12.765	70.850.000	12.957	75.101.000,00	13.151	82.611.100,00	13.414	90.872.250,00	13.682	99.959.500,00			Puskesmas Rantau Rasau		
	119	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Puskesmas Sungai Tering)	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas		207	2.829	23.285.000	2.871	24.682.100,00	2.914	27.150.310,00	2.972	29.865.350,00	3.032	32.851.850,00			Puskesmas Sungai Tering		
	120	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Puskesmas Nipah Panjang)	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas		697	10.468	40.776.137	10.625	43.222.700,00	10.784	47.544.970,00	11.000	52.299.450,00	11.220	57.529.400,00			Puskesmas Nipah Panjang		
	121	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Puskesmas Mendahara)	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas		858	11.208	58.120.000	11.376	61.607.200,00	11.547	67.767.920,00	11.777	74.544.700,00	12.013	81.999.150,00			Puskesmas Mendahara		
	122	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Puskesmas Pangkal Duri)	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas		343	2.199	41.040.000	2.231	43.502.400,00	2.265	47.852.640,00	2.310	52.637.900,00	2.356	57.901.700,00			Puskesmas Pangkal Duri		
	123	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Puskesmas Berbak)	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas		352	5.415	56.500.000	5.497	59.890.000,00	5.579	65.879.000,00	5.691	72.466.900,00	5.804	79.713.550,00			Puskesmas Berbak		
	124	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Puskesmas Sungai Lokan)	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas		95	1.925	10.800.000	1.954	11.448.000,00	1.983	12.592.800,00	2.023	13.852.050,00	2.063	15.237.250,00			Puskesmas Sungai Lokan		
	125	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Puskesmas Sungai Jambat)	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas		133	2.523	38.690.000	2.560	41.011.400,00	2.599	45.112.540,00	2.651	49.623.750,00	2.704	54.586.100,00			Puskesmas Sungai Jambat		
	126	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Puskesmas Air Hitam Laut)	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas		146	2.132	36.991.135	2.164	39.210.600,00	2.196	43.131.660,00	2.240	47.444.800,00	2.285	52.189.250,00			Puskesmas Air Hitam Laut		

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Kondisi Kinerja Awal		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	PELAKSANA	LOKASI					
			Kinerja	Rp (ribu)	2021		2022		2023		2024		2025					2026				
					Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)				Kinerja	Rp (ribu)			
1.02.02.2.02.08	127	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (DINKES)	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7.071		54.214		54.589		54.964		37.511.135	55.239	41.262.200,00	55.514	45.388.400,00	55.789	49.927.250,00		174.088.985	Bidang P2P	
	128	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (Puskesmas Muara Sabak Barat)	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	778		4.417				5.500.000		5.940.000,00		6.534.000,00		7.187.400,00		7.906.150,00			Puskesmas Muara Sabak Barat	
	129	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (Puskesmas Simpang Pandan)	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	249		5.751				19.935.000		21.529.800,00		23.682.780,00		26.051.050,00		28.656.150,00			Puskesmas Simpang Pandan	
	130	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (Puskesmas Simpang Tuan)	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	538		4.580				17.200.000		18.576.000,00		20.433.600,00		22.476.950,00		24.724.600,00			Puskesmas Simpang Tuan	
	131	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (Puskesmas Muara Sabak Timur)	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	409		3.696				4.800.000		5.184.000,00		5.702.400,00		6.272.650,00		6.899.900,00			Puskesmas Muara Sabak Timur	
	132	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (Puskesmas Simbur Naik)	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	251		1.330				4.200.000		4.536.000,00		4.989.600,00		5.488.560,00		6.037.400,00			Puskesmas Simbur Naik	
	133	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (Puskesmas Lambur)	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	904		2.776				1.820.000		1.965.600,00		2.162.160,00		2.378.350,00		2.616.150,00			Puskesmas Lambur	
	134	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (Puskesmas Kampung Laut)	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	666		3.643				7.200.000		7.776.000,00		8.553.600,00		9.408.960,00		10.349.800,00			Puskesmas Kampung Laut	
	135	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (Puskesmas Dendang)	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	88		3.739				23.040.000		24.883.200,00		27.371.520,00		30.108.600,00		33.119.450,00			Puskesmas Dendang	
	136	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (Puskesmas Rantau Rasau)	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	295		5.877				15.000.000		15.000.000,00		16.500.000,00		18.150.000,00		19.965.000,00			Puskesmas Rantau Rasau	
	137	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (Puskesmas Sungai Tering)	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	423		1.263				8.280.000		8.942.400,00		9.836.640,00		10.820.300,00		11.902.300,00			Puskesmas Sungai Tering	
	138	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (Puskesmas Nipah Panjang)	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	403		5.100				26.669.930		28.803.500,00		31.683.850,00		34.852.200,00		38.337.400,00			Puskesmas Nipah Panjang	
	139	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (Puskesmas Mendahara)	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	806		5.439				5.100.000		5.508.000,00		6.058.800,00		6.664.680,00		7.331.150,00			Puskesmas Mendahara	
	140	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (Puskesmas Pangkal Duri)	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	337		1.094				3.650.000		3.942.000,00		4.336.200,00		4.769.850,00		5.246.800,00			Puskesmas Pangkal Duri	
	141	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (Puskesmas Berbak)	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	220		2.485				6.000.000		6.480.000,00		7.128.000,00		7.840.800,00		8.624.850,00			Puskesmas Berbak	
	142	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (Puskesmas Sungai Lokan)	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	206		932				9.850.000		10.638.000,00		11.701.800,00		12.871.980,00		14.159.150,00			Puskesmas Sungai Lokan	
	143	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (Puskesmas Sungai Jambai)	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	156		1.108				8.500.000		8.500.000,00		9.350.000,00		10.285.000,00		11.313.500,00			Puskesmas Sungai Jambai	
	144	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (Puskesmas Air Hitam Laut)	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	291		1.003				37.511.135		35.000.000,00		38.500.000,00		42.350.000,00		46.585.000,00			Puskesmas Air Hitam Laut	
1.02.02.2.02.09	145	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus (DINKES)	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.025		1.122		100%		100%		37.511.135	100%	49.262.300,00	100%	54.188.530,00	100%	59.607.350,00	100%	200.569.315	Bidang P2P	

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Kondisi Kinerja Awal		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	PELAKSANA	LOKASI		
					2021		2022		2023		2024		2025					2026	
			Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)				Kinerja	Rp (ribu)
146	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus (Puskesmas Muara Sabak Barat)	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	95		41		4.650.000		4.882.500,00		5.370.750,00		5.907.825,00		6.498.600,00			Puskesmas Muara Sabak Barat	
147	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus (Puskesmas Simpang Pandan)	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	102		24		16.335.000		17.151.750,00		18.866.925,00		20.753.600,00		22.828.950,00			Puskesmas Simpang Pandan	
148	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus (Puskesmas Simpang Tuan)	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	75		47		17.945.000		18.842.250,00		20.726.475,00		22.799.100,00		25.079.000,00			Puskesmas Simpang Tuan	
149	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus (Puskesmas Muara Sabak Timur)	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	69		57		-		15.000.000,00		16.500.000,00		18.150.000,00		19.965.000,00			Puskesmas Muara Sabak Timur	
150	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus (Puskesmas Simbur Naik)	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	25		32		3.360.000		3.528.000,00		3.880.800,00		4.268.880,00		4.695.750,00			Puskesmas Simbur Naik	
151	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus (Puskesmas Lambur)	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	57		57		1.820.000		3.911.000,00		4.302.100,00		4.732.300,00		5.205.500,00			Puskesmas Lambur	
152	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus (Puskesmas Kampung Laut)	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	95		42		7.200.000		7.560.000,00		8.316.000,00		9.147.600,00		10.062.400,00			Puskesmas Kampung Laut	
153	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus (Puskesmas Dendang)	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	39		20		23.190.000		24.349.500,00		26.784.450,00		29.462.875,00		32.409.200,00			Puskesmas Dendang	
154	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus (Puskesmas Rantau Rasau)	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	93		16		600.000		630.000,00		693.000,00		762.300,00		838.500,00			Puskesmas Rantau Rasau	
155	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus (Puskesmas Sungai Tereng)	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	27		59		26.400.000		27.720.000,00		30.492.000,00		33.541.200,00		36.895.300,00			Puskesmas Sungai Tereng	
156	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus (Puskesmas Nipah Panjang)	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	101		45		34.669.976		36.403.450,00		40.043.795,00		44.048.100,00		48.452.900,00			Puskesmas Nipah Panjang	
157	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus (Puskesmas Mendahara)	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	116		63		5.100.000		5.355.000,00		5.890.500,00		6.479.550,00		7.127.500,00			Puskesmas Mendahara	
158	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus (Puskesmas Pangkal Duri)	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	22		26		4.680.000		4.914.000,00		5.405.400,00		5.945.940,00		6.540.500,00			Puskesmas Pangkal Duri	
159	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus (Puskesmas Berbak)	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	44		11		6.000.000		6.300.000,00		6.930.000,00		7.623.000,00		8.385.300,00			Puskesmas Berbak	
160	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus (Puskesmas Sungai Lokan)	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	20		13		9.950.000		10.447.500,00		11.492.250,00		12.641.475,00		13.905.600,00			Puskesmas Sungai Lokan	
161	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus (Puskesmas Sungai Jambati)	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	22		24		3.840.000		4.032.000,00		4.435.200,00		4.878.720,00		5.366.600,00			Puskesmas Sungai Jambati	
162	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus (Puskesmas Air Hitam Laut)	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	23		40		37.511.135		39.386.700,00		43.325.370,00		47.657.900,00		52.423.700,00			Puskesmas Air Hitam Laut	
1.02.02.2.02.10	163 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (DINKES)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	389		401	100%		100%	29.250.000		32.175.000,00	100%	35.392.500,00	100%	37.516.050	100%	134.333.550	Dinkes	
164	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Muara Sabak Barat)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	43		33		29.600.000		31.376.000,00		34.513.600,00		37.964.960,00		40.242.850			Puskesmas Muara Sabak Barat	

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Kondisi Kinerja Awal		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	PELAKSANA	LOKASI						
					2021		2022		2023		2024		2025		2026										
			Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)				Kinerja	Rp (ribu)				
	165	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Sampang Pandan)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	42		45			39.160.000			41.509.600,00			45.660.560,00			50.226.600,00			53.240.200			Puskesmas Sampang Pandan	
	166	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Simpang Tuan)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	36		34			60.040.000			63.642.400,00			70.006.640,00			77.007.304,00			81.627.700			Puskesmas Simpang Tuan	
	167	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Muara Sabak Timur)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	14		27			8.100.000			8.586.000,00			9.444.600,00			10.389.060,00			11.012.400			Puskesmas Muara Sabak Timur	
	168	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Simbur Naik)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	9		10			5.395.000			5.718.700,00			6.290.570,00			6.919.627,00			7.334.800			Puskesmas Simbur Naik	
	169	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Lambur)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	24		20			6.780.000			7.186.800,00			7.905.480,00			8.696.028,00			9.217.800			Puskesmas Lambur	
	170	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Kampung Laut)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	6		27			51.115.000			54.181.900,00			59.600.090,00			65.560.099,00			69.493.700			Puskesmas Kampung Laut	
	171	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Dendang)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	15		28			5.800.000			6.148.000,00			6.762.800,00			7.439.080,00			7.885.400			Puskesmas Dendang	
	172	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Rantau Rasau)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	20		43			17.100.000			18.126.000,00			19.938.600,00			21.932.460,00			23.248.400			Puskesmas Rantau Rasau	
	173	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Sungai Tering)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	14		9			15.880.000			16.832.800,00			18.516.080,00			20.367.688,00			21.589.700			Puskesmas Sungai Tering	
	174	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Nipah Panjang)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	59		38			7.740.160			8.204.550,00			9.025.005,00			9.927.505,50			10.523.150			Puskesmas Nipah Panjang	
	175	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Mendahara)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	66		40			13.600.000			14.416.000,00			15.857.600,00			17.443.360,00			18.489.950			Puskesmas Mendahara	
	176	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Pangkal Duri)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	4		8			8.140.000			8.628.400,00			9.491.240,00			10.440.364,00			11.066.800			Puskesmas Pangkal Duri	
	177	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Berbak)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	12		18			12.000.000			12.720.000,00			13.992.000,00			15.391.200,00			16.314.650			Puskesmas Berbak	
	178	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Sungai Lokan)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	5		7			1.200.000			1.272.000,00			1.399.200,00			1.539.120,00			1.631.400			Puskesmas Sungai Lokan	
	179	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Sungai Jambat)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	11		8			30.100.000			31.906.000,00			35.096.600,00			38.606.260,00			40.922.600			Puskesmas Sungai Jambat	
	180	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Air Hitam Laut)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	9		7			29.250.000			31.005.000,00			34.105.500,00			37.516.050,00			39.767.000			Puskesmas Air Hitam Laut	
1.02.02.2.02.11	181	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (DINKES)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	30,10%		1	75%		64.320.000	80%		63.352.496	85%		79.687.700,00	90%		91.640.855,00	100%		105.386.950	404.388.001		Bidang P2P	
	182	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Muara Sabak Barat)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas						22.306.000			24.536.600,00			26.990.260,00			31.038.799,00			35.694.600			Puskesmas Muara Sabak Barat	
	183	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Simpang Pandan)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas						34.175.000			37.592.500,00			41.351.750,00			47.554.512,50			54.687.700			Puskesmas Simpang Pandan	

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Kondisi Kinerja Awal		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	PELAKSANA	LOKASI
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)			
184	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Simbang Tuan)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas				95.800.000		105.380.000,00		115.918.000,00		133.305.700,00		153.301.550			Puskesmas Simbang Tuan		
185	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Muara Sabak Timur)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas				23.150.000		25.465.000,00		28.011.500,00		32.213.225,00		37.045.200			Puskesmas Muara Sabak Timur		
186	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Simbur Naik)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas				9.005.000		9.905.500,00		10.896.050,00		12.530.457,50		14.410.000			Puskesmas Simbur Naik		
187	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Lambur)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas				11.540.000		12.694.000,00		13.963.400,00		16.057.910,00		18.466.600			Puskesmas Lambur		
188	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Kampung Laut)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas				80.800.000		88.880.000,00		97.768.000,00		112.433.200,00		129.298.200			Puskesmas Kampung Laut		
189	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Dendang)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas				29.140.000		32.054.000,00		35.259.400,00		40.548.310,00		46.630.550			Puskesmas Dendang		
190	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Rantau Rasau)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas				35.800.000		39.380.000,00		43.318.000,00		49.815.700,00		57.288.050			Puskesmas Rantau Rasau		
191	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Sungai Tering)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas				86.530.000		95.183.000,00		104.701.300,00		120.406.495,00		138.467.500			Puskesmas Sungai Tering		
192	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Nipah Panjang)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas				27.192.856		29.912.150,00		32.903.365,00		37.838.869,75		43.514.700			Puskesmas Nipah Panjang		
193	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Mendahara)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas				29.800.000		32.780.000,00		36.058.000,00		41.466.700,00		47.686.700			Puskesmas Mendahara		
194	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Pangkal Duri)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas				4.950.000		5.445.000,00		5.989.500,00		6.887.925,00		7.921.100			Puskesmas Pangkal Duri		
195	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Berbak)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas				9.850.000		10.835.000,00		11.918.500,00		13.706.275,00		15.762.200			Puskesmas Berbak		
196	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Sungai Lokan)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas				12.820.000		14.102.000,00		15.512.200,00		17.839.030,00		20.514.850			Puskesmas Sungai Lokan		
197	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Sungai Jambat)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas				19.935.000		21.928.500,00		24.121.350,00		27.739.552,50		31.900.450			Puskesmas Sungai Jambat		
198	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Air Hitam Laut)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas				63.352.496		69.687.750,00		76.656.525,00		88.155.003,75		101.378.250			Puskesmas Air Hitam Laut		
1.02.02.2.02.12	199 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (DINKES)	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				10.415.000		27.322.496		50.054.750,00		57.562.962,50		66.197.400		211.552.609	Dinkes		
	200 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Puskesmas Muara Sabak Barat)	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas				36.750.000		40.425.000,00		44.467.500,00		51.137.625,00		58.808.300			Puskesmas Muara Sabak Barat		
	201 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Puskesmas Simbang Pandan)	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas				14.475.000		15.922.500,00		17.514.750,00		20.141.962,50		23.163.250			Puskesmas Simbang Pandan		
	202 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Puskesmas Simbang Tuan)	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas				28.040.000		30.844.000,00		33.928.400,00		39.017.660,00		44.870.300			Puskesmas Simbang Tuan		

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Kondisi Kinerja Awal		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PELAKSANA	LOKASI		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	
			Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)			Kinerja	Rp (ribu)
	203	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Puskesmas Muara Sabak Timur)						7.720.000		8.492.000,00		9.341.200,00		10.742.380,00		12.353.750			Puskesmas Muara Sabak Timur	
	204	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Puskesmas Simbur Naik)					8.161.000		8.977.100,00		9.874.810,00		11.356.031,50		13.059.450				Puskesmas Simbur Naik	
	205	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Puskesmas Lambur)					6.530.000		7.183.000,00		7.901.300,00		9.086.495,00		10.449.500				Puskesmas Lambur	
	206	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Puskesmas Kampung Laut)					22.900.000		25.190.000,00		27.709.000,00		31.865.350,00		36.645.150				Puskesmas Kampung Laut	
	207	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Puskesmas Dendang)					20.965.000		23.061.500,00		25.367.650,00		29.172.797,50		33.548.700				Puskesmas Dendang	
	208	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Puskesmas Rantau Rasau)					4.400.000		4.840.000,00		5.324.000,00		6.122.600,00		7.040.950				Puskesmas Rantau Rasau	
	209	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Puskesmas Sungai Tering)					45.760.000		50.336.000,00		55.369.600,00		63.675.040,00		73.226.300				Puskesmas Sungai Tering	
	210	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Puskesmas Nipah Panjang)					36.120.810		39.732.850,00		43.706.135,00		50.262.055,25		57.801.350				Puskesmas Nipah Panjang	
	211	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Puskesmas Mendahara)					33.600.000		36.960.000,00		40.656.000,00		46.754.400,00		53.767.550				Puskesmas Mendahara	
	212	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Puskesmas Pangkal Duri)							25.000.000,00		27.500.000,00		31.625.000,00		36.368.750				Puskesmas Pangkal Duri	
	213	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Puskesmas Berbak)					24.000.000		26.400.000,00		29.040.000,00		33.396.000,00		38.405.400				Puskesmas Berbak	
	214	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Puskesmas Sungai Lokan)					8.500.000		9.350.000,00		10.285.000,00		11.827.750,00		13.601.900				Puskesmas Sungai Lokan	
	215	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Puskesmas Sungai Jambak)					21.150.000		23.265.000,00		25.591.500,00		29.430.225,00		33.844.750				Puskesmas Sungai Jambak	
	216	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (Puskesmas Air Hitam Laut)					27.231.135		29.954.250,00		32.949.675,00		37.892.126,25		43.575.900				Puskesmas Air Hitam Laut	
1.02.02.2.02.14	217	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana (DINKES)	1 Dokumen		1 Dokumen		156.453.500	1 Dokumen	109.000.000	1 Dokumen	119.900.000,00	1 Dokumen	127.094.000,00	1 Dokumen	119.900.000,00	1 Dokumen	632.347.500		Bidang P2P	
	218	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana (Puskesmas Muara Sabak Barat)	1 Dokumen		1 Dokumen		149.625.000	1 Dokumen	134.662.500,00	1 Dokumen	148.128.750,00	1 Dokumen	157.016.475,00	1 Dokumen	148.128.750,00	1 Dokumen			Puskesmas Muara Sabak Barat	
	219	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana (Puskesmas Simpang Pandan)	1 Dokumen		1 Dokumen		89.499.800	1 Dokumen	80.549.850,00	1 Dokumen	88.604.835,00	1 Dokumen	93.921.125,10	1 Dokumen	88.604.800,00	1 Dokumen			Puskesmas Simpang Pandan	
	220	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana (Puskesmas Simpang Tuan)	1 Dokumen		1 Dokumen		142.900.000	1 Dokumen	128.610.000,00	1 Dokumen	141.471.000,00	1 Dokumen	149.959.260,00	1 Dokumen	141.471.000,00	1 Dokumen			Puskesmas Simpang Tuan	
	221	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana (Puskesmas Muara Sabak Timur)	1 Dokumen		1 Dokumen		126.365.900	1 Dokumen	113.729.310,00	1 Dokumen	125.102.240,00	1 Dokumen	132.608.374,40	1 Dokumen	125.102.250,00	1 Dokumen			Puskesmas Muara Sabak Timur	

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														PELAKSANA	LOKASI		
			Kondisi Kinerja Awal		2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	
			Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)			Kinerja	Rp (ribu)
222	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana (Puskesmas Simbur Naik)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	68.385.000	1 Dokumen	61.546.500,00	1 Dokumen	67.701.150,00	1 Dokumen	71.763.219,00	1 Dokumen	67.701.150,00	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Puskesmas Simbur Naik		
223	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana (Puskesmas lambur)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	77.385.000	1 Dokumen	69.646.500,00	1 Dokumen	76.611.150,00	1 Dokumen	81.207.819,00	1 Dokumen	76.611.150,00	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Puskesmas Lambur		
224	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana (Puskesmas Kampung Laut)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	45.000.000,00	1 Dokumen	49.500.000,00	1 Dokumen	52.470.000,00	1 Dokumen	49.500.000,00	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Puskesmas Kampung Laut		
225	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana (Puskesmas Dendang)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.500.000	1 Dokumen	90.450.000,00	1 Dokumen	99.495.000,00	1 Dokumen	105.464.700,00	1 Dokumen	99.495.000,00	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Puskesmas Dendang		
226	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana (Puskesmas Rantau Rasau)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	118.609.800	1 Dokumen	106.748.850,00	1 Dokumen	117.423.735,00	1 Dokumen	124.469.159,10	1 Dokumen	117.423.700,00	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Puskesmas Rantau Rasau		
227	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana (Puskesmas Sungai Tering)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	132.060.000	1 Dokumen	118.854.000,00	1 Dokumen	130.739.400,00	1 Dokumen	138.583.764,00	1 Dokumen	130.739.400,00	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Puskesmas Sungai Tering		
228	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana (Puskesmas Nipah Panjang)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	144.120.000	1 Dokumen	129.708.000,00	1 Dokumen	142.678.800,00	1 Dokumen	151.239.528,00	1 Dokumen	142.678.800,00	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Puskesmas Nipah Panjang		
229	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana (Puskesmas Mendahara)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	86.400.000	1 Dokumen	77.760.000,00	1 Dokumen	85.536.000,00	1 Dokumen	90.668.160,00	1 Dokumen	85.536.000,00	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Puskesmas Mendahara		
230	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana (Puskesmas Pangkal Duri)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	58.675.000	1 Dokumen	52.807.500,00	1 Dokumen	58.088.250,00	1 Dokumen	61.573.545,00	1 Dokumen	58.088.250,00	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Puskesmas Pangkal Duri		
231	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana (Puskesmas Berbak)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	99.685.000	1 Dokumen	89.716.500,00	1 Dokumen	98.688.150,00	1 Dokumen	104.609.439,00	1 Dokumen	98.688.150,00	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Puskesmas Berbak		
232	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana (Puskesmas Sungai Lokan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	55.270.000	1 Dokumen	49.743.000,00	1 Dokumen	54.717.300,00	1 Dokumen	58.000.338,00	1 Dokumen	54.717.300,00	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Puskesmas Sungai Lokan		
233	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana (Puskesmas Sungai Jambat)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	75.750.000	1 Dokumen	68.175.000,00	1 Dokumen	74.992.500,00	1 Dokumen	79.492.050,00	1 Dokumen	74.992.500,00	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Puskesmas Sungai Jambat		

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Kondisi Kinerja Awal		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PELAKSANA	LOKASI		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	
			Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)			Kinerja	Rp (ribu)
	234	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana (Puskesmas Air Hitam Laut)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar di wilayah Kerja Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	115.200.000	1 Dokumen	103.680.000,00	1 Dokumen	114.048.000,00	1 Dokumen	120.890.880,00	1 Dokumen	114.048.000,00	1 Dokumen	1.471.640.078	Puskesmas Air Hitam Laut		
1.02.02.2.02.15	235	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (DINKES)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di wilayah Kerja Puskesmas	4 Dokumen	4 Dok	609.622.964	4 Dok	498.470.141	4 Dok	75.231.135	4 Dok	82.754.250,00	4 Dok	95.167.387,50	4 Dok	110.394.200	4 Dok	1.471.640.078	Dinkes	
	236	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Muara Sabak Barat)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di wilayah Kerja Puskesmas	4 Dokumen	4 Dok	-	4 Dok	111.008.000	4 Dok	122.108.800,00	4 Dok	134.319.680,00	4 Dok	154.467.632,00	4 Dok	179.182.500	4 Dok		Puskesmas Muara Sabak Barat	
	237	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Simpang Pandan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di wilayah Kerja Puskesmas	4 Dokumen	4 Dok	-	4 Dok	161.040.000	4 Dok	177.144.000,00	4 Dok	194.858.400,00	4 Dok	224.087.160,00	4 Dok	259.941.100	4 Dok		Puskesmas Simpang Pandan	
	238	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Simpang Tuan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di wilayah Kerja Puskesmas	4 Dokumen	4 Dok	-	4 Dok	63.305.000	4 Dok	69.635.500,00	4 Dok	76.599.050,00	4 Dok	88.088.907,50	4 Dok	102.183.100	4 Dok		Puskesmas Simpang Tuan	
	239	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Muara Sabak Timur)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di wilayah Kerja Puskesmas	4 Dokumen	4 Dok	-	4 Dok	50.435.000	4 Dok	55.478.500,00	4 Dok	61.026.350,00	4 Dok	70.180.302,50	4 Dok	81.409.150	4 Dok		Puskesmas Muara Sabak Timur	
	240	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Simbur Naik)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di wilayah Kerja Puskesmas	4 Dokumen	4 Dok	-	4 Dok	29.340.000	4 Dok	32.274.000,00	4 Dok	35.501.400,00	4 Dok	40.826.610,00	4 Dok	47.358.850	4 Dok		Puskesmas Simbur Naik	
	241	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Lambur)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di wilayah Kerja Puskesmas	4 Dokumen	4 Dok	-	4 Dok	66.880.000	4 Dok	73.568.000,00	4 Dok	80.924.800,00	4 Dok	93.063.520,00	4 Dok	107.953.700	4 Dok		Puskesmas Lambur	
	242	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Kampung Laut)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di wilayah Kerja Puskesmas	4 Dokumen	4 Dok	-	4 Dok	98.567.900	4 Dok	108.424.650,00	4 Dok	119.267.115,00	4 Dok	137.157.182,25	4 Dok	159.102.300	4 Dok		Puskesmas Kampung Laut	
	243	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Dendang)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di wilayah Kerja Puskesmas	4 Dokumen	4 Dok	-	4 Dok	39.115.000	4 Dok	43.026.500,00	4 Dok	47.329.150,00	4 Dok	54.428.522,50	4 Dok	63.137.050	4 Dok		Puskesmas Dendang	
	244	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Rantau Rasau)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di wilayah Kerja Puskesmas	4 Dokumen	4 Dok	-	4 Dok	9.800.000	4 Dok	10.780.000,00	4 Dok	11.858.000,00	4 Dok	13.636.700,00	4 Dok	15.818.500	4 Dok		Puskesmas Rantau Rasau	
	245	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Sungai Tering)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di wilayah Kerja Puskesmas	4 Dokumen	4 Dok	-	4 Dok	91.655.000	4 Dok	100.820.500,00	4 Dok	110.902.550,00	4 Dok	127.537.932,50	4 Dok	14.794.400	4 Dok		Puskesmas Sungai Tering	
	246	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Nipah Panjang)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di wilayah Kerja Puskesmas	4 Dokumen	4 Dok	-	4 Dok	43.223.526	4 Dok	47.545.850,00	4 Dok	52.300.435,00	4 Dok	60.145.500,25	4 Dok	69.768.750	4 Dok		Puskesmas Nipah Panjang	
	247	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Mendahara)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di wilayah Kerja Puskesmas	4 Dokumen	4 Dok	-	4 Dok	66.700.000	4 Dok	73.370.000,00	4 Dok	80.707.000,00	4 Dok	92.813.050,00	4 Dok	107.663.100	4 Dok		Puskesmas Mendahara	
	248	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Pangkal Duri)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di wilayah Kerja Puskesmas	4 Dokumen	4 Dok	-	4 Dok	36.140.000	4 Dok	39.754.000,00	4 Dok	43.729.400,00	4 Dok	50.288.810,00	4 Dok	58.335.000	4 Dok		Puskesmas Pangkal Duri	
	249	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Berbak)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di wilayah Kerja Puskesmas	4 Dokumen	4 Dok	-	4 Dok	28.200.000	4 Dok	31.020.000,00	4 Dok	34.122.000,00	4 Dok	39.240.300,00	4 Dok	45.518.700	4 Dok		Puskesmas Berbak	
	250	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Sungai Lokan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di wilayah Kerja Puskesmas	4 Dokumen	4 Dok	-	4 Dok	27.935.000	4 Dok	30.728.500,00	4 Dok	33.801.350,00	4 Dok	38.871.552,50	4 Dok	45.091.000	4 Dok		Puskesmas Sungai Lokan	
	251	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Sungai Jambat)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di wilayah Kerja Puskesmas	4 Dokumen	4 Dok	-	4 Dok	20.205.000	4 Dok	22.225.500,00	4 Dok	24.448.050,00	4 Dok	28.115.257,50	4 Dok	32.613.700	4 Dok		Puskesmas Sungai Jambat	
	252	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Air Hitam Laut)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat di wilayah Kerja Puskesmas	4 Dokumen	4 Dok	-	4 Dok	75.231.135	4 Dok	82.754.250,00	4 Dok	91.029.675,00	4 Dok	104.684.126,25	4 Dok	121.433.600	4 Dok		Puskesmas Air Hitam Laut	
1.02.02.2.02.16	253	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dok	42.481.830	1 Dok	11.591.800	1 Dok	12.750.980,00	1 Dok	14.026.078,00	1 Dok	15.428.685,80	1 Dok	16.971.550	1 Dok	113.250.924	Bidang Kesmas	
1.02.02.2.02.17	254	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dok	1.015.088.294	1 Dok	210.757.729	1 Dok	8.019.800	1 Dok	8.821.780,00	1 Dok	59.703.958,00	1 Dok	68.659.550	1 Dok	1.371.051.111	Bidang Kesmas	
1.02.02.2.02.18	255	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dok	326.028.188	1 Dok	147.032.083	1 Dok	79.900.935	1 Dok	87.891.000,00	1 Dok	96.680.100,00	1 Dok	111.182.100	1 Dok	848.714.406	Bidang Kesmas	

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Kondisi Kinerja Awal		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	PELAKSANA	LOKASI			
					2021		2022		2023		2024		2025		2026							
			Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)				Kinerja	Rp (ribu)	
1.02.02.2.02.19	256	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen		1 Dok	-	1 Dok	54.715.000	1 Dok		1 Dok	38.500.000,00	1 Dok	42.350.000,00	1 Dok	38.500.000,00	1 Dok	209.065.000	Bidang Yankes dan SDK		
1.02.02.2.02.20	257	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	93.764.900	1 Dokumen	15.715.000	1 Dokumen		1 Dokumen	48.060.000	1 Dokumen	52.866.000,00	1 Dokumen	58.152.600,00	1 Dokumen	58.152.600,00	326.711.100	Bidang P2P	
1.02.02.2.02.22	258	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	35		40	111.031.390	45	74.607.000	50		55	88.000.000	60	96.800.000,00	65	96.800.000,00	65	547.238.390	Bidang P2P		
1.02.02.2.02.23	259	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	3 Dokumen		3 Dokumen	457.260.000	3 Dokumen	735.916.035	3 Dokumen		3 Dokumen	450.000.000	3 Dokumen	495.000.000,00	3 Dokumen	544.500.000,00	3 Dokumen	544.500.000,00	3.227.176.035	Bidang Yankes dan SDK	
1.02.02.2.02.25	260	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen		1 Dokumen	2.143.832.000	1 Dokumen	1.277.311.600	1 Dokumen		1 Dokumen	29.879.942	1 Dokumen	32.867.900,00	1 Dokumen	36.154.690,00	1 Dokumen	43.385.600	3.563.431.732	Bidang P2P	
			Jumlah penemuan dan penanganan DBD	1																		
			Jumlah anak dan balita yang mendapatkan obat cacing																			
			Jumlah anggota keluarga tidak ada yang merokok																			
			Jumlah Pos Pembinaan Tepadu (Posbindu) PTM																			
			Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar																			
			Jumlah Penderita Obesitas Yang ditangani																			
			Jumlah Penemuan kusta tanpa cacat																			
			Jumlah penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu																			
1.02.02.2.02.26	261	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				5.181.249.800		5.663.876.390				5.663.876.390		6.230.264.029,00		6.853.290.431,90		7.538.619.500	37.131.176.541	Bidang Yankes dan SDK	
1.02.02.2.02.33	262	Operasional Pelayanan Puskesmas (Muara Sabak Barat)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1.437.248.030		610.426.100				610.426.100		671.468.710,00		738.615.581,00		812.477.200	4.880.661.721	Puskesmas Muara Sabak Barat	
1.02.02.2.02.33	263	Operasional Pelayanan Puskesmas (Simpang Pandan)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1.828.049.700		1.020.684.979				1.020.684.979		1.122.753.400,00		1.235.028.740,00		1.358.531.600	7.585.733.398	Puskesmas Simpang Pandan	
1.02.02.2.02.33	264	Operasional Pelayanan Puskesmas (Simpang Tuan)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1.814.696.740		783.581.740				783.581.740		861.939.900,00		948.133.890,00		1.042.947.200	6.234.881.210	Puskesmas Simpang Tuan	
1.02.02.2.02.33	265	Operasional Pelayanan Puskesmas (Muara Sabak Timur)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1.475.497.700		699.147.434				699.147.434		769.062.150,00		845.968.365,00		930.565.200	5.419.388.283	Puskesmas Muara Sabak Timur	
1.02.02.2.02.33	266	Operasional Pelayanan Puskesmas (Simbur Naik)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				667.492.560		314.848.860				314.848.860		346.333.746,00		380.967.120,60		419.063.800	2.443.554.947	Puskesmas Simbur Naik	
1.02.02.2.02.33	267	Operasional Pelayanan Puskesmas (Lambur)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1.259.872.800		507.511.300				507.511.300		558.262.430,00		614.088.673,00		675.497.500	4.122.744.003	Puskesmas Lambur	
1.02.02.2.02.33	268	Operasional Pelayanan Puskesmas (Kampung Laut)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1.480.866.400		662.398.532				662.398.532		728.638.350,00		801.502.185,00		881.652.400	5.217.456.399	Puskesmas Kampung Laut	
1.02.02.2.02.33	269	Operasional Pelayanan Puskesmas (Derdang)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1.258.370.500		651.972.000				651.972.000		717.169.200,00		788.886.120,00		867.774.700	4.936.144.520	Puskesmas Dendang	
1.02.02.2.02.33	270	Operasional Pelayanan Puskesmas (Rantau Rasau)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1.793.127.700		892.673.019				892.673.019		981.940.300,00		1.080.134.330,00		1.188.147.700	6.828.696.068	Puskesmas Rantau Rasau	
1.02.02.2.02.33	271	Operasional Pelayanan Puskesmas (Sungai Tering)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				949.837.780		363.767.280				363.767.280		400.144.000,00		440.158.400,00		484.174.200	3.001.848.940	Puskesmas Sungai Tering	
1.02.02.2.02.33	272	Operasional Pelayanan Puskesmas (Nipah Panjang)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1.760.587.000		909.399.961				909.399.961		1.000.339.900,00		1.100.373.890,00		1.210.411.200	6.890.511.912	Puskesmas Nipah Panjang	
1.02.02.2.02.33	273	Operasional Pelayanan Puskesmas (Mendahara)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1.742.789.000		776.027.000				776.027.000		853.628.700,00		938.992.670,00		1.032.891.900	6.120.357.270	Puskesmas Mendahara	
1.02.02.2.02.33	274	Operasional Pelayanan Puskesmas (Pangkal Duri)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				804.198.950		373.836.600				373.836.600		411.220.260,00		452.342.286,00		497.576.500	2.913.011.196	Puskesmas Pangkal Duri	
1.02.02.2.02.33	275	Operasional Pelayanan Puskesmas (Berbak)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1.049.782.600		629.942.600				629.942.600		692.936.860,00		762.230.546,00		838.453.600	4.603.288.800	Puskesmas Berbak	

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Kondisi Kinerja Awal		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	PELAKSANA	LOKASI		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026						
			Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)				Kinerja	Rp (ribu)
1.02.02.2.02.33	276 Operasional Pelayanan Puskesmas (Sungai Lokan)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			495.399.000		280.827.000		280.827.000		308.909.700,00		339.800.670,00		373.780.700		2.079.544.070	Puskesmas Sungai Lokan			
1.02.02.2.02.33	277 Operasional Pelayanan Puskesmas (Sungai Jabat)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			620.372.300		378.264.200		378.264.200		416.090.620,00		457.699.682,00		503.469.650		2.754.160.652	Puskesmas Sungai Jabat			
1.02.02.2.02.33	278 Operasional Pelayanan Puskesmas (Air Hitam Laut)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1.279.192.640		488.260.503		488.260.503		537.086.550,00		590.795.205,00		649.874.700		4.033.470.101	Puskesmas Air Hitam Laut			
1.02.02.2.02.34	279 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			521.315.057		655.277.273		655.277.273		720.805.000,00		792.885.500,00		872.174.050		4.217.734.153	IFK Kabupaten			
1.02.02.2.02.35	280 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	14 Unit		500.000.000	18 Unit	500.000.000	18 Unit	500.000.000	18 Unit	500.000.000	18 Unit	500.000.000	18 Unit	500.000.000	18 Unit	500.000.000	18 Unit	3.050.000.000	Bidang Yankes dan SDK	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga PHBS	49,40		49,98	524.248.089	50,55	490.997.000	51,13	526.106.000	51,70	537.086.000	52,28	557.098.000	52,85	571.315.000	52,7	3.206.650.089			
1.02.05.01	A. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				524.248.089		184.205.392		241.106.000		300.586.000		321.598.000		353.315.000		1.925.058.481	Bidang Kesmas			
1.02.05.01.01	1 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			524.248.089		184.205.392		241.106.000		300.586.000		321.598.000		353.315.000			Bidang Kesmas			
1.02.05.02	B. Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				-		306.791.608		196.000.000		161.500.000		235.500.000		218.000.000		1.117.791.608	Bidang Kesmas			
1.02.05.02.01	1 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			-		306.791.608		196.000.000		161.500.000		235.500.000		218.000.000			Bidang Kesmas			
1.02.05.03	C. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-		-		89.000.000		75.000.000		-		-		164.000.000	Bidang Kesmas			
1.02.05.03.01	1 Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			-		-		89.000.000		75.000.000		-		-			Bidang Kesmas			
		Indeks Kepuasan Masyarakat	76,61%		76,63%		76,66%		76,70%		76,75%		76,81%		76,88%		76,88%				
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	76,61%		76,63%	279.483.650	76,66%	508.557.600	76,70%	507.784.450	76,75%	639.953.000	76,81%	553.756.750	76,88%	537.570.000	76,88%	3.027.105.450			
1.02.02.2.03	C. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi			70%	279.483.650	75%	508.557.600	85%	507.784.450	90%	639.953.000	95%	553.756.750	100%	537.570.000	100%	3.027.105.450			
1.02.02.2.03.01	1 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	2 Dokumen		2 Dokumen	279.483.650	2 Dokumen	200.343.000	5 Dokumen	230.394.450	5 Dokumen	264.953.000	5 Dokumen	253.756.750	5 Dokumen	291.820.000		Sekretariat			
1.02.02.2.03.02	2 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	-	1 Dokumen	308.214.600	1 Dokumen	277.390.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	115.000.000	1 Dokumen	132.250.000		Bidang Yankes dan SDK			
1.02.02.2.03.03	3 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	NA		0	-	0	-	0	-	125.000.000	9 Paket	185.000.000	4 Paket	113.500.000			Bidang Yankes dan SDK			
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	NA		62,5%		70%		77,5%		85%		92,5%		100%		100%				
		Jumlah Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	4 PKM		8 PKM	25.922.500	10 PKM	48.000.250	12 PKM	26.014.000	14 PKM	26.557.000	17 PKM	27.547.000	17 PKM	28.250.000	17 PKM	182.290.750			
1.02.03.2.01	A. Pemberian Ijin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/ Kota.	Persentase Ijin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota			-		5.900.000		5.000.000		5.500.000		6.000.000		7.500.000		29.900.000				
1.02.03.2.01.02	1 Pembinaan dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan					5.900.000,0		5.000.000,0		5.500.000,0		6.000.000,0		7.500.000,0			Bidang Yankes dan SDK			
1.02.03.2.02	B. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/ Kota.	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)			25.922.500		39.118.038		18.514.000		16.557.000		18.047.000		20.750.000		138.908.538				

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Kondisi Kinerja Awal		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PELAKSANA	LOKASI			
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD		
			Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)			Kinerja	Rp (ribu)	
1.02.03.2.02.01	1 Perencanaan dan Distribusi Serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	22.978.038,0	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	10.047.000,0	1 Dokumen	10.750.000,0	1 Dokumen		Bidang Yankes dan SDK		
1.02.03.2.02.02	2 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	8 PKM		8 PKM		10 PKM	10.740.000,0	12 PKM		14 PKM		14 PKM	6.057.000,0	17 PKM	8.000.000,0	17 PKM	10.000.000,0	17 PKM	Bidang Yankes dan SDK	
1.02.03.2.02.03	3 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	25.922.500,0	1 Dokumen	5.400.000	1 Dokumen	12.500.000	1 Dokumen	10.500.000	1 Dokumen	10.500.000	1 Dokumen	10.500.000	1 Dokumen	10.500.000	1 Dokumen	Bidang Yankes dan SDK	
1.02.03	C. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Ditingkatkan kompetensinya						2.982.212		2.500.000		4.500.000		3.500.000				13.482.212			
1.02.03.2.03.01	1 Pengembangan mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya						2.982.212,0		2.500.000,0		4.500.000,0		3.500.000,0						Bidang Yankes dan SDK	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Ketersediaan Obat, Vaksin di Puskesmas		100		547.584.000	100	495.944.000	100	549.524.000	100	560.993.000	100	581.896.000	100	596.746.000	100	3.332.687.000			
1.02.04.2.01	A. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, UMOY yang Dilakukan Tindak Lanjut Pengawasan				65.922.580		20.635.000		45.950.000		52.842.500		60.768.850		69.884.000		316.002.930			
1.02.04.2.01.01	1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen		1 Dokumen	65.922.580,0	1 Dokumen	20.635.000,0	1 Dokumen	45.950.000,0	1 Dokumen	52.842.500,0	1 Dokumen	60.768.850,0	1 Dokumen	69.884.000,0	1 Dokumen			Bidang Yankes dan SDK	
1.02.04.2.03	B. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang bersertifikat/ memiliki izin Produksi				481.661.420		409.570.000		435.574.000		434.710.500		441.811.950		441.201.600		2.644.529.470			
1.02.04.2.03.01	1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen		1 Dokumen	481.661.420	1 Dokumen	409.570.000	1 Dokumen	435.574.000	1 Dokumen	434.710.500	1 Dokumen	441.811.950	1 Dokumen	441.201.600	1 Dokumen			Bidang Yankes dan SDK	
1.02.04.2.06	C. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dimasyarakat				-		65.739.000		68.000.000		73.440.000		79.315.200		85.660.400		372.154.600			
1.02.04.2.06.01	1 Pemeriksaan post market pada produk makanan-minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan.	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				-		65.739.000,0		68.000.000,0		73.440.000,0		79.315.200,0		85.660.400,0				Bidang Yankes dan SDK	
		Predikat AKIP	CC		CC		B		B		BB		BB		A		A				
		Laporan Keuangan Sesuai SAP	Sesuai		Sesuai		Sesuai		Sesuai		Sesuai		Sesuai		Sesuai		Sesuai				
1.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	89,23	89,25	50.452.249.034,00	89,3	51.158.227.902,00	89,35	54.859.412.978,45	89,40	61.059.602.730,53	89,45	66.859.535.894,08	89,50	73.393.169.493,00	89,50	357.782.198.032,06				
		Indeks Pelayanan Instansi	NA	78		81		84		88,31		88,6		89		89					
1.02.01.2.01	A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Tahunan yang Disusun Sesuai Pedoman yang Berlaku	100%		507.046.500,0	100%	526.249.400,0	100%	632.874.300,0	100%	695.081.700,0	100%	763.423.500,0	100%	838.506.100,0	100%	3.963.181.500,0				

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Kondisi Kinerja Awal		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														PELAKSANA	LOKASI		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD					
			Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)				
1.02.01.2.01.01	1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	507.046.500,0	9 Dokumen	526.249.000	9 Dokumen	578.874.300	9 Dokumen	54.000.000	9 Dokumen	636.761.700	9 Dokumen	770.481.700	9 Dokumen	770.481.700	9 Dokumen	319.843.237.903	Sekretariat			
	2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	0	0	0	0	2 Dokumen	54.000.000	2 Dokumen	58.320.000	2 Dokumen	62.985.600	2 Dokumen	68.024.400	2 Dokumen	68.024.400	2 Dokumen		Sekretariat		
1.02.01.2.02	B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan waktu penyampaian rekonsiliasi laporan keuangan	100%	100%	45.950.494.405,00	100%	44.862.941.393,00	100%	49.349.235.532,00	100%	54.284.159.085,53	100%	59.712.574.994,08	100%	65.683.832.493,00	100%	65.683.832.493,00	100%	319.843.237.903			
		Persentase Penyerapan Anggaran	76,06%	92%		93%		95%		97%		98%		99%		100%						
1.02.01.2.02.01	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		45.950.494.405		44.862.941.393		49.349.235.532		54.284.159.086		59.712.574.994		65.683.832.493		65.683.832.493				Sekretariat		
1.02.01.2.05	C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Urusan Kesehatan	NA	89,30%	164.095.212	89,35%	285.607.000	89,40%	367.094.700	89,45%	421.815.650	89,50%	474.577.000	89,55%	525.710.500	89,55%	525.710.500	89,55%	2.238.900.062,0			
1.02.01.2.05.02	1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	50 Steel	41.446.000,0	85 Steel	25.500.000	95 Steel	45.500.000	105 Steel	55.500.000	115 Steel	65.500.000	125 Steel	75.500.000	125 Orang	75.500.000						
1.02.01.2.05.05	2 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	9.540.000	1 Dokumen	10.971.000	1 Dokumen	12.616.650	1 Dokumen	14.509.000	1 Dokumen	16.685.500	1 Dokumen	16.685.500						
1.02.01.2.05.09	3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	24 Orang	122.649.212	40 Orang	250.567.000	45 Orang	275.623.700	55 Orang	308.699.000	65 Orang	339.568.000	75 Orang	373.525.000							
1.02.01.2.05.10	4 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	NA	0	0	0	45 Orang	35.000.000	45 Orang	45.000.000	45 Orang	55.000.000	45 Orang	60.000.000	180 Orang	60.000.000						
1.02.01.2.06	D. Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah Urusan Kesehatan	89,23%	89,30%	297.401.106	89,35%	260.089.823	89,40%	417.815.646	89,45%	459.597.195	89,50%	377.445.350	89,55%	557.229.500	89,55%	557.229.500	89,55%	2.369.578.620,5			
1.02.01.2.06.01	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	42.673.500,0	1 Paket	35.108.811	1 Paket	40.375.133	1 Paket	44.412.645	1 Paket	48.853.900	1 Paket	53.739.250						Sekretariat	
1.02.01.2.06.02	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	74.650.606,0	1 Paket	59.228.012	1 Paket	68.112.214	1 Paket	74.923.450	1 Paket	82.415.700	1 Paket	90.657.200						Sekretariat	
1.02.01.2.06.03	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	0	0	0	0	1 Paket	15.000.000	1 Paket	16.500.000	1 Paket	18.150.000	1 Paket	19.965.000						Sekretariat	
1.02.01.2.06.05	4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	31.341.000,0	1 Paket	31.797.000	1 Paket	34.976.700	1 Paket	38.474.350	1 Paket	42.321.750	1 Paket	46.553.900						Sekretariat	
1.02.01.2.06.06	5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	4.800.000,0	1 Dokumen	3.500.000	1 Dokumen	3.850.000	1 Dokumen	4.235.000	1 Dokumen	4.658.500	1 Dokumen	5.124.350						Sekretariat	
1.02.01.2.06.08	6 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		7.500.000,0		8.000.000		8.800.000		9.680.000		10.648.000		11.712.800							Sekretariat	
1.02.01.2.06.09	7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Dokumen	11 Dokumen	136.436.000,0	11 Dokumen	122.456.000	11 Dokumen	134.701.600	11 Dokumen	148.171.750	11 Dokumen	170.397.500	11 Dokumen	204.477.000	11 Dokumen	204.477.000	11 Dokumen			Sekretariat	
1.02.01.2.06.11	8 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	NA	1 Dok	0	1 Dok	0	1 Dok	112.000.000	1 Dok	123.200.000	0	1 Dok	1 Dok	1 Dok						Sekretariat	
1.02.01.2.07	E. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah Urusan Kesehatan	89,23%	89,30%	767.713.205	89,35%	1.181.388.774	89,40%	487.505.500	89,45%	1.354.718.500	89,50%	1.124.172.250	89,55%	896.168.400	89,55%	896.168.400	89,55%	5.811.666.629,0			
1.02.01.2.07.01	1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	0	0	1 Unit	350.000.000	0	0	1 Unit	300.000.000	0	2 Unit	0	0	0	2 Unit			Sekretariat	
1.02.01.2.07.02	2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	2 Unit	571.700.000,0	3 Unit	1.061.630.000	0	0	2 Unit	1.200.000.000	1 Unit	650.000.000	1 Unit	700.000.000	9 Unit	700.000.000	9 Unit			Sekretariat	
1.02.01.2.07.05	3 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	35 Paket	62.050.000	20 Paket	68.255.000	25 Paket	75.080.500	35 Paket	82.588.550	45 Paket	90.847.400							Sekretariat	
1.02.01.2.07.06	4 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	35 Paket	196.013.205,0	15 Paket	57.708.774	20 Paket	69.250.500	20 Paket	79.638.000	23 Paket	91.583.700	28 Paket	105.321.000						Sekretariat	
1.02.01.2.08	F. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Kesehatan	89,23%	89,30%	143.050.606	89,35%	139.628.012	89,40%	178.590.800	89,45%	183.590.800	89,50%	203.949.900	89,55%	225.844.850	89,55%	225.844.850	89,55%	1.074.654.968,0			
1.02.01.2.08.01	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen				Sekretariat	
1.02.01.2.08.02	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	68.400.000	1 Dokumen	80.400.000	1 Dokumen	88.440.000	1 Dokumen	88.440.000	1 Dokumen	97.284.000	1 Dokumen	107.012.400	1 Dokumen	107.012.400	1 Dokumen			Sekretariat	

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Kondisi Kinerja Awal		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														PELAKSANA	LOKASI	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD				
			Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)			Kinerja
1.02.01.2.08.03	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	74.650.606	1	59.228.012	1	65.150.800	1	65.150.800	1	71.665.900	1	78.832.450	1		Sekretariat	
1.02.01.2.09	G.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Kesehatan	89,23%		89,30%	185.238.000	89,35%	1.212.150.000	89,40%	467.106.000	89,45%	405.530.000	89,50%	622.772.400	89,55%	727.194.750	89,55%	3.619.991.150,0		
1.02.01.2.09.02	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit		20 Unit	139.990.000,0	20 Unit	291.950.000	20 Unit	315.306.000	20 Unit	340.530.000	20 Unit	367.772.400	20 Unit	397.194.750	20 Unit		Sekretariat	
1.02.01.2.09.06	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Paket		24 Paket	15.260.000,0	0	0	20 Paket	16.800.000	15 Paket	20.000.000	20 Paket	25.000.000	25 Paket	35.000.000			Sekretariat	
1.02.01.2.09.09	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket		1 Paket	29.988.000,0	6 Paket	920.200.000	1 Paket	45.000.000	1 Paket	45.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	60.000.000	1 Paket		Sekretariat	
1.02.01.2.09.10	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0		0	-	0	0	18 Paket	90.000.000	0	0	18 Paket	180.000.000	20 Paket	235.000.000			Sekretariat	
							99.187.840.453		92.590.945.038		103.309.343.721		112.547.553.365		119.194.840.866		125.222.144.860				